

**PERAN TATA NIAGA PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP  
KETERSEDIAAN PUPUK BAGI PETANI DI  
KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

Nama : Alvaro Arkananta Mohammad  
Rayhan Brazilianto  
Nomor Mahasiswa : 21313104  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## **HALAMAN JUDUL**

Peran Tata Niaga Pupuk Bersubsidi terhadap Ketersediaan Pupuk bagi Petani di  
Kabupaten Sleman

## **SKRIPSI**

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1  
Program Studi Ekonomi Pembangunan,  
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Alvaro Arkananta Mohammad  
Rayhan Brazilianto  
Nomor Mahasiswa : 21313104  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARSIME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIRASIME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Penulis,



Alvaro Arkananta Mohammad Rayhan Brazilianto

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Peran Tata Niaga Pupuk Bersubsidi terhadap Ketersediaan Pupuk bagi Petani di  
Kabupaten Sleman

Nama : Alvaro Arkananta Mohammad  
Rayhan Brazilianto  
Nomor Mahasiswa : 21313104  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

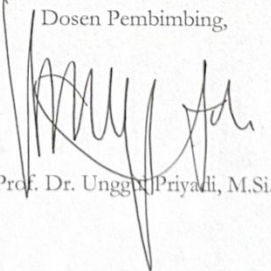
Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

19/8 ace ypan



## **PENGESAHAN UJIAN**

### **BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

#### **SKRIPSI BERJUDUL**

**Peran Tata Niaga Pupuk Bersubsidi terhadap Ketersediaan Pupuk bagi Petani di Kabupaten Sleman**

Disusun oleh : ALVARO ARKANANTA MOHAMMAD  
RAYHAN BRAZILIANTO

Nomor Mahasiswa : 21313104

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Kamis, 04 September 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Drs. Unggul Priyadi, M.Si.

Penguji : Suharto, SE., M.Si.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

*“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”*

(QS. Al-Insyirah: 6)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”*

(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ Nomor 3289).

*“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan”*

(Imam Syafi’i)

*“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”*

(Nelson Mandela)

*“Doa orang tua adalah kunci, usaha adalah jalan, sabar adalah bekal, dan cinta adalah penguat.”*

(Penulis)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, serta kemudahan dan kelancaran yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Orang tua, Bapak Amara Brazilianto dan Ibu Pranawengdyah Kartika Dewi atas kasih sayang, perhatian, doa, semangat, dan segalanya, baik berupa moril maupun material, yang tanpa henti diberikan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Almarhum Eyang Bapak Marsono Soediro, Almarhumah Eyang Ibu Mintarsih, Almarhum Eyang Kakung Eddy Sumarno, Eyang Putri Ambar Rukmi Suskamtini, Aldecha Arkana Mohammad Daffa Brazilianto, dan seluruh keluarga yang selalu memberi dorongan semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Elvina Nathania Salim yang selalu memberikan perhatian, doa, serta semangat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatub*

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Tata Niaga Pupuk Bersubsidi terhadap Ketersediaan Pupuk bagi Petani di Kabupaten Sleman” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana jenjang Strata 1 di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, doa, semangat, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan ketulusan yang mendalam penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan yang dilimpahkan-Nya kepada penulis selama menulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si, Ph.D., CfrA., CertIPSAS., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Abdul Hakim., S.E., M.Ec., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Unggul Priyadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing skripsi dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran. Penulis sangat berterima kasih atas segala pengetahuan, motivasi, dan saran yang diberikan.
5. Ibu Dra. Ari Rudatin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu dan memberi masukan terhadap kegiatan akademik selama masa perkuliahan.
6. Bapak Amara Brazilianto, S.E. dan Ibu Pranawengdyah Kartika Dewi, S.E., orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang sejak di dalam kandungan sampai saat ini, doa yang dipanjatkan dalam hening malam, dan pengorbanan yang tidak pernah mungkin bisa penulis balas. Skripsi ini adalah

buah kecil dari perjuangan panjang Papa dan Mama, semoga keberhasilan ini menjadi alasan kecil bagi Papa dan Mama untuk tersenyum bahagia. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, umur yang panjang, rezeki, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup Papa dan Mama.

7. Almarhum Eyang Bapak Marsono Soediro dan Almarhumah Eyang Ibu Mintarsih, yang meskipun telah tiada, doa dan kasih sayang semasa hidup tetap terpatri dalam hati penulis, menjadi sumber semangat untuk terus berjuang.
8. Almarhum Eyang Kakung Eddy Sumarno, yang kehangatan dan nasihatnya masih penulis rasakan hingga kini, serta Eyang Putri Ambar Rukmi Suskamtini yang masih selalu mendoakan dan memberi dorongan penuh kepada penulis.
9. Aldecha Arkana Mohammad Daffa Brazilianto, adik penulis yang hadir dengan tawa, canda, dan semangatnya, serta selalu menjadi pengingat bagi penulis untuk tetap berusaha dan berjuang. Terima kasih telah membuat perjalanan ini lebih berwarna. Semoga apa yang telah penulis raih dapat menjadi teladan bagimu untuk terus bermimpi dan berjuang tanpa kenal lelah.
10. Elvina Nathania Salim, kekasih hati penulis yang setia menemani setiap langkah, menghadirkan doa, kesabaran, dan kasih sayang yang tak ternilai bagi penulis, yang hadir bukan hanya sebagai penyemangat, tetapi juga tempat pulang di setiap penulis merasa lelah. Terima kasih atas pengertian, kesabaran, dan cinta yang tak pernah pudar, meski seringkali merasa lelah dalam perjalanan ini. Teruslah tumbuh bersama sebagai dua insan yang saling mencintai, sekarang, esok, dan selamanya.
11. Sahabat-sahabat penulis, Arya, Faraj, Gem, Yalesveva, Rizky, dan Arethusia, yang menjadi teman diskusi, berbagi cerita, dan saling menguatkan selama penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat seperjuangan pada Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2021, atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang telah diberikan.
13. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*  Wilayah Jawa Tengah 3 dan Daerah Istimewa Yogyakarta, para pelaku usaha distribusi (distributor), penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer), dan petani yang telah berkenan

memberikan informasi, data, dan kesempatan wawancara sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

14. Untuk diri sendiri, Alvaro Arkananta Mohammad Rayhan Brazilianto, terima kasih untuk terus berusaha hingga saat ini, yang telah berjuang melawan ragu, bangkit dari jatuh berkali-kali, dan memilih untuk terus melangkah meski jalannya kadang terasa berat.
15. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah membantu.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatub*

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Penulis,



Alvaro Arkananta Mohammad Rayhan Brazilianto

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARSIME .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penelitian .....	7
BAB II LANDASAN TEORI .....	8
2.1 Kajian Pustaka .....	8
2.2 Landasan Teori .....	16
2.2.1 Kebijakan Publik.....	16
2.2.2 Subsidi.....	18
2.2.3 Pupuk Bersubsidi.....	20
2.2.4 Tata Niaga .....	22
2.2.5 Produktivitas Pertanian.....	24
2.2.6 Teori Keagenan.....	25
2.3 Kerangka Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN .....	28
3.1 Jenis Penelitian .....	28
3.2 Lokasi Penelitian .....	28
3.3 Subjek Penelitian .....	29

3.4	Uji Keabsahan Data .....	32
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6	Teknik dan Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>36</b>
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
4.3.2	Gambaran Umum Kabupaten Sleman.....	36
4.1.2	Gambaran Umum Informan Penelitian.....	38
4.1.3	<i>Text Search Query</i> .....	42
4.2	<i>Stakeholder</i> dalam Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman.....	43
4.2.1	<i>Peran Stakeholder</i> dalam Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman .....	43
4.3	Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani dan Kendala dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman .....	49
4.3.1	Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Sleman.....	49
4.3.2	Kendala dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2020-2025.....	2
Tabel 1. 2 Perhitungan Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sleman Tahun 2025 .....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian .....	31
Tabel 4. 1 Poin Utama Hasil Penelitian Peran Stakeholder dalam Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman .....	47
Tabel 4. 2 Poin Utama Hasil Penelitian Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Sleman .....	54
Tabel 4. 3 Poin Utama Hasil Penelitian Kendala dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman.....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alokasi Anggaran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014-2025.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	27
Gambar 3. 1 Keputusan Menambah, Mengurangi, atau Mengganti Informan .....	30
Gambar 4. 1 Gambaran Informan Penelitian .....	39
Gambar 4. 2 Kata Kunci Responden .....	40
Gambar 4. 3 Alur Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman .....	43
Gambar 4. 4 Gambaran Hasil Wawancara Mengenai Peran Stakeholder dalam Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman.....	44
Gambar 4. 5 Gambaran Hasil Wawancara Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Sleman.....	51
Gambar 4. 6 Hasil Wawancara Kendala Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman .....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penelitian .....	66
Lampiran 2 Pedoman Wawancara .....	66
Lampiran 3 Dokumentasi .....	75

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi terhadap ketersediaan pupuk bagi petani di Kabupaten Sleman. Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis data menggunakan software *Nvivo* 12 untuk mengolah data hasil wawancara dari berbagai informan yang terlibat langsung dalam tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman. Fokus penelitian meliputi efektivitas peran berbagai *stakeholder* dalam tata niaga distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman, ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Sleman, dan kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman melibatkan sejumlah *stakeholder* mulai dari tingkat pemerintah daerah, produsen, pelaku usaha distribusi (distributor), hingga penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer), masing-masing *stakeholder* memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang saling terkait. Ketersediaan stok pupuk bersubsidi di tingkat pengecer di Kabupaten Sleman selalu tersedia dan penyaluran mengikuti alokasi nasional yang terekap dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), dengan pengawasan transparan oleh PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*. Dalam pelaksanaannya, petani masih menghadapi kendala signifikan dalam proses penebusan karena permasalahan administrasi. Permasalahan ini bersifat non-pasokan dan menyoroti urgensi perbaikan prosedur administrasi serta kemudahan akses bagi petani untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar efektif sampai kepada petani yang berhak.

**Kata Kunci:** Tata Niaga Pupuk Bersubsidi, Sistem e-RDKK, Ketersediaan Pupuk, Kendala Penyaluran.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor penggerak perekonomian dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan nasional. Pemerintah harus mendorong usaha pertanian agar produktivitas pertanian dapat meningkat. Sektor pertanian untuk dapat terus berperan dalam perekonomian nasional membutuhkan pupuk sebagai sarana produksi yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Dalam sejarahnya, pupuk telah menyumbang keberhasilan sebesar 20 persen peningkatan produksi pertanian dalam kurun waktu tahun 1965 sampai 1980, bahkan Indonesia berhasil dalam mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Dengan demikian sangat penting untuk menjamin kestabilan harga dan kelancaran distribusi pupuk (Ismail et. al, 2025).

Pupuk memainkan peranan krusial dalam peningkatan hasil panen dan efisiensi usaha tani secara keseluruhan (Sudjono, 2016). Tanpa dukungan pupuk yang memadai, baik secara kuantitas, kualitas, maupun harga, target swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional akan sulit tercapai. Menyadari pentingnya pupuk sebagai komponen vital dalam sistem pertanian, pemerintah Indonesia telah lama menjalankan program subsidi pupuk sebagai bentuk intervensi fiskal dalam mendukung petani kecil. Subsidi pupuk merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk menekan biaya produksi petani, menjaga kestabilan harga hasil pertanian, dan meningkatkan pendapatan petani. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari strategi besar untuk mencapai ketahanan pangan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Rachman (2012) mengatakan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi tidak hanya mencerminkan upaya negara dalam memberdayakan petani, tetapi juga sebagai pendekatan strategis jangka panjang dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Peraturan ini menetapkan bahwa pupuk bersubsidi, berada di bawah

pengawasan pemerintah. Perpres ini mengatur pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran, dan harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan HET untuk pupuk bersubsidi agar terjangkau oleh petani. HET pupuk berlaku untuk pembelian pupuk di kios pengecer resmi. Ilustrasi besaran harga eceran tertinggi tingkat nasional ditunjukkan dengan tabel berikut:

**Tabel 1. 1** Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2020-2025

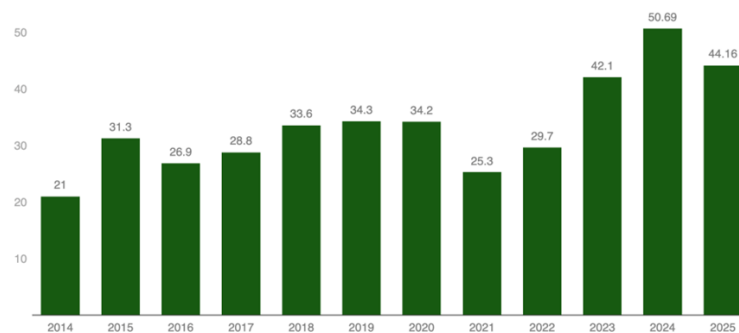
JENIS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
UREA	1.800	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
SP 36	2.000	2.400	2.400	-	-	-
ZA	1.400	1.700	1.700	-	-	-
NPK	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
ORGANIK	500	800	800	-	800	800
NPK KHUSUS	-	-	3.300	3.300	3.300	3.300

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Berbagai Periode Waktu

Dalam hal alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi, Pemerintah Indonesia menjadikan subsidi pupuk sebagai prioritas fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 44,15 sampai 44,16 triliun. Angka ini turun dibanding *outlook* tahun 2024 sebesar Rp 50,68 triliun, yang merupakan cerminan upaya efisiensi dan perbaikan target penyaluran. Pada tahun 2025, subsidi pupuk mendominasi sekitar 70 sampai 79 % dari total anggaran Kementerian Pertanian (Rp 29,4 triliun), hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya program ini bagi ketahanan pangan nasional. Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan antara 9,03 juta ton hingga 9,55 juta ton, mencakup jenis pupuk Urea, NPK, NPK khusus, dan pupuk organik, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sembilan jenis komoditas penting, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu. Sasarannya adalah petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Dalam pelaksanaannya, terdapat gap antara pagu anggaran dan kuota tonase, mengindikasikan potensi penambahan alokasi jika realisasi mendekati target. Kendati begitu, hingga 10 Juni 2025, realisasi penyaluran pupuk subsidi baru mencapai 34 % dari kuota tahunan

(sekitar 3,3 juta ton dari 9,55 juta ton). Penyaluran itu dinilai lebih cepat dibanding tahun sebelumnya yang menandakan perbaikan distribusi. Alokasi anggaran pupuk bersubsidi dalam APBN diilustrasikan dalam grafik berikut:

**Gambar 1. 1** Alokasi Anggaran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014-2025  
(Dalam Triliun)



Sumber: Kompas.com (2024)

Selama beberapa tahun terakhir, alokasi subsidi pupuk mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2024, subsidi ini mencapai Rp50,69 triliun, yang merupakan jumlah tertinggi sepanjang sejarah alokasi subsidi pupuk di Indonesia. Sebelumnya, anggaran subsidi pupuk pernah mengalami penurunan pada periode 2020 dan 2021, ketika masing-masing alokasinya berada pada Rp34,2 triliun dan Rp25,3 triliun. Namun, pada tahun 2022 anggaran subsidi ini kembali meningkat dan mengalami lonjakan signifikan pada 2023, yang mencapai kenaikan sebesar 41,8% dengan total Rp42,1 triliun. Untuk tahun 2025, pemerintah meningkatkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9 juta ton untuk memenuhi kebutuhan petani. Angka ini menunjukkan peningkatan dari alokasi awal tahun 2024 yang hanya sebesar 4,75 juta ton, meskipun terjadi penurunan jika dibandingkan dengan penambahan terbaru pada tahun ini yang mencapai 9,55 juta ton. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi biaya transportasi yang tinggi, terutama di daerah terpencil, serta peraturan ketat yang mengharuskan petani menunjukkan bukti kepemilikan tanah saat menebus pupuk. Distribusi pupuk di sejumlah daerah juga diatur sesuai musim tanam, yang dapat menyulitkan petani yang membutuhkan pupuk di luar periode tersebut.

Berdasarkan ketentuan terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, penyaluran pupuk bersubsidi telah diatur melalui sistem distribusi yang melibatkan pemerintah, produsen, pelaku usaha distribusi (distributor), dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer). Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah kelangkaan pupuk dan memastikan ketersediaan bagi petani yang membutuhkan. Dalam praktiknya, ditemukan sejumlah masalah seperti penyalahgunaan distribusi, ketidaktepatan sasaran penerima, dan kurangnya pengawasan di lapangan. Persoalan pengelolaan pupuk dan kaitannya dengan ketahanan pangan merupakan masalah yang kompleks yang harus dilihat dari sisi multidimensi. Salah satunya adalah masalah kelembagaan dan institusi selaku aktor yang terlibat dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang baik serta kesungguhan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, hasil yang diperoleh tentunya tidak akan optimal dan bersifat sementara saja (Jamil, 2022).

Kabupaten Sleman, yang terletak di wilayah utara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), merupakan salah satu daerah yang memiliki kontribusi signifikan dalam sektor pertanian regional. Meskipun mengalami perkembangan urbanisasi yang pesat, sektor pertanian di Kabupaten Sleman tetap bertahan sebagai salah satu pilar ekonomi lokal, terutama di wilayah perdesaan.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, luas panen padi mencapai melebihi 25.000 hektar dengan produktivitas rata-rata sekitar 5,5 ton per hektar, menandakan bahwa pertanian masih menjadi andalan di wilayah ini. Kebanyakan petani adalah petani kecil dengan lahan di bawah dua hektar, yang sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk menjaga produktivitas tanaman dan menekan biaya produksi.

Pada tahun 2025, Kabupaten Sleman memperoleh alokasi sebesar 9.492 ton untuk pupuk urea dan 7.470 ton untuk pupuk NPK. Sistem e-RDKK Kabupaten Sleman merekam 51.982 petani dengan jumlah rencana tanam sebesar 48.101 hektar, serta kebutuhan pupuk yang diajukan mencapai 10.971 ton untuk pupuk urea dan 12.492 ton untuk pupuk NPK. Hal itu menunjukkan alokasi masih berada di bawah usulan kebutuhan. Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman yang terdaftar pada

sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) diilustrasikan pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2** Perhitungan Alokasi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sleman Tahun 2025

No.	Wilayah	Jumlah Baris	Jumlah NIK	Jumlah Rencana Tanam	Jumlah Urea	Alokasi Urea	Jumlah NPK	Alokasi NPK
1	GAMPING	1.809	1.611	1.629	365.796	316.477	404.280	241.745
2	GODEAN	3.220	2.717	2.750	618.950	535.500	683.964	408.987
3	MOYUDAN	3.756	3.692	3.316	740.771	640.896	813.480	486.433
4	MINGGIR	3.300	3.171	3.291	741.349	641.396	824.285	492.894
5	SEYEGAN	4.177	3.660	3.109	707.294	611.933	786.637	470.382
6	MLATI	2.771	2.524	2.041	460.710	398.595	511.743	306.005
7	DEPOK	866	840	621	142.881	123.617	160.882	96.202
8	BERBAH	3.584	3.536	2.948	688.759	595.897	785.988	469.994
9	PRAMBANAN	5.871	5.327	4.068	942.924	815.794	1.097.291	656.142
10	KALASAN	4.344	4.164	3.811	891.153	771.003	1.015.511	607.240
11	NGEMPLAK	3.688	3.640	4.357	1.015.369	878.472	1.160.239	693.783
12	NGAGLIK	3.789	3.604	3.528	818.973	708.555	943.657	564.274
13	SLEMAN	3.746	3.577	3.617	844.793	730.894	965.759	577.490
14	TEMPEL	4.977	4.282	3.266	702.604	607.875	799.431	478.032
15	TURI	718	718	946	140.294	121.379	256.255	153.232
16	PAKEM	3.676	2.782	2.561	625.244	540.945	685.481	409.894
17	CANGKRINGAN	2.151	2.137	2.242	523.330	452.772	597.481	357.273
	Total	56.443	51.982	48.101	10.971.194	9.492.000	12.492.364	7.470.000

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman (2025)

Sejak Oktober 2024, Kabupaten Sleman menerapkan kebijakan penebusan pupuk menggunakan KTP atau kartu tani, didukung oleh aplikasi *i-Pubers* dan mesin *MPos* yang terintegrasi. Untuk memperlancar distribusi dan entri data petani, Kabupaten Sleman membentuk jejaring dengan 77 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang tersebar di 86 kalurahan. Mereka mendampingi petani dalam pengisian e-RDKK dan integrasi dengan sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam pelaksanaannya, kendala administrasi tetap menjadi tantangan besar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai peran tata niaga pupuk bersubsidi, baik dari segi distribusi maupun efektivitas kelembagaan, dalam mendukung keberlanjutan produksi pertanian dan

ketahanan pangan di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Peran Tata Niaga Pupuk Bersubsidi terhadap Ketersediaan Pupuk bagi Petani di Kabupaten Sleman.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah mengenai bagaimana efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi terhadap ketersediaan pupuk bagi petani di Kabupaten Sleman?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Menganalisis peran berbagai *stakeholder* dalam tata niaga distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman.
2. Mengkaji ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Sleman dan kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang terjadi di lapangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai Peran Tata Niaga Pupuk Bersubsidi terhadap Ketersediaan Pupuk bagi Petani di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir S1 Ekonomi Pembangunan, serta memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai tata niaga pupuk bersubsidi dan kendala yang terjadi dalam distribusinya.

- b. Bagi Akademika

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi khususnya bagi penelitian yang memiliki tema yang sama, yaitu tentang tata niaga pupuk bersubsidi.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pupuk bersubsidi, khususnya mengenai tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini memaparkan sistematika penulisan sebagaimana gambaran umum proposal skripsi. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi teori-teori untuk memahami dan mengidentifikasi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi kajian metode penelitian yang digunakan penulis dalam mencapai tujuan dari topik yang sedang dibahas dan menjelaskan data yang digunakan dalam penelitian serta sumber-sumber datanya.

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Pada bab ini berisi hasil penelitian dari pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode analisis, serta deskripsi dan uraian dari hasil penelitian yang telah selesai di analisis.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran terhadap kekurangan yang telah ditetapkan setelah penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka berperan penting dalam menyajikan gambaran penelitian terdahulu yang diperlukan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penulisan skripsi ini, penting untuk mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagai landasan penelitian yang saat ini dilakukan. Selain itu, peneliti mengkaji beberapa penelitian sebelumnya untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian yang sudah ada agar terhindar dari plagiarisme. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipilih dan digunakan penulis sebagai acuan dasar dalam penelitian:

1. Hasil penelitian (Jamil, 2023)

Penelitian Jamil yang berjudul “*Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk Menwujudkan Ketahanan Pangan*” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berupa kajian kepustakaan yang berusaha menggambarkan peran aktor dalam pengelolaan pupuk bersubsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pupuk bersubsidi terdapat tiga aktor besar yang terlibat, yakni pemerintah, lembaga pengawas, dan organisasi yang terdampak kebijakan. Koordinasi dan sinergi ketiganya dalam pengelolaan pupuk bersubsidi masih tergolong lemah, sehingga berpengaruh terhadap proses penyaluran yang tidak sesuai dengan asas ketepatan. Kondisi ini dapat mempunyai dampak pada upaya pencapaian peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

2. Hasil penelitian (Ramlayana, Arsyarni, dan Sudarmi, 2020)

Penelitian Ramlayana, Arsyarni, dan Sudarmi yang berjudul “*Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*” dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone terdapat yang efektif dan terdapat yang tidak efektif. Hal ini dilihat dari empat indikator, yaitu (1) Tepat jenis,

sudah efektif karena di dalam konsep RDKK petanilah yang mengajukan atau memesan berbagai jenis pupuk dalam mengembangkan usaha taninya. (2) Tepat Jumlah, sudah efektif karena berdasarkan kepada luas lahan petani yang mengusahakan usaha tani pada sawah. (3) Tepat Harga, belum efektif karena adanya biaya tambahan untuk petani sehingga mengalami kenaikan harga yang tidak sesuai HET. (4) Tepat Waktu, belum efektif karena penyaluran pendistribusian sering mengalami keterlambatan.

3. Hasil penelitian (Wijayanto dan Lestari, 2022)

Penelitian Wijayanto dan Lestari yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah)*” dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dan perolehan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, serta telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Kartu Tani di Desa Siwarak sudah sesuai pada regulasi, yaitu pengusulan, penerbitan dan penebusan. Namun, dalam penerapannya masih belum optimal. Faktor pendukung dari implementasi, yaitu adanya sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, dan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat dilihat dari adanya keterbatasan jarak dan biaya dalam mengakses pupuk subsidi, hambatan dalam penyusunan dan validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), serta lemahnya jaringan dalam mengakses Kartu Tani.

4. Hasil penelitian (Gaol, Anggreni, dan Arisena, 2023)

Penelitian Gaol, Anggreni, dan Arisena yang berjudul “*Analisis Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Studi Kasus pada CV Mas Ayu Lestari)*” meneliti sistem distribusi pupuk bersubsidi dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara dan observasi langsung terhadap pelaku usaha distribusi, dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer), dan petani sebagai aktor utama dalam rantai pasok. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Simalungun belum mampu memenuhi prinsip distribusi yang ideal seperti tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat lokasi. Hal ini disebabkan oleh kendala administratif, kapasitas

logistik, serta lemahnya koordinasi antara pelaku usaha distribusi dengan pemerintah daerah.

5. Hasil penelitian (Nuryanti, Zainuddin, dan Lilis, 2025)

Penelitian Nuryanti, Zainuddin, dan Lilis yang berjudul “*Strategi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Lumu Sulawesi Selatan*” menggunakan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan wawancara mendalam kepada petani, aparat desa, serta dinas pertanian setempat. Mereka juga melakukan analisis SWOT untuk menyusun strategi optimal dalam distribusi pupuk bersubsidi. Penelitian ini menyoroti sejumlah kelemahan mendasar seperti kurangnya koordinasi lintas sektor, lambatnya proses verifikasi data petani, dan tidak meratanya akses terhadap kartu tani. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi memerlukan integrasi sistem yang lebih efisien antara pemerintah daerah, distributor, serta kelompok tani, serta pentingnya peningkatan kapasitas petani dalam mengakses informasi dan pelayanan pupuk.

6. Hasil penelitian (Anisa dan Adnan, 2021)

Penelitian Anisa dan Adnan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman*” melakukan kajian evaluatif terhadap implementasi program kartu tani sebagai instrumen digital dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap petani pengguna kartu tani, pengecer pupuk, penyuluh pertanian lapangan, serta aparatur desa. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan kartu tani sebagai alat pengendali distribusi pupuk dan sejauh mana program ini berdampak pada kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara konsep kartu tani bertujuan untuk menata sistem distribusi agar lebih transparan dan akuntabel, namun dalam implementasinya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan teknis dan sosial, seperti sering terjadinya gangguan pada perangkat *Electronic Data Capture* (EDC) yang digunakan untuk transaksi, minimnya sosialisasi sehingga banyak petani belum

memahami prosedur penggunaan kartu, serta ketidaksesuaian antara data dalam e-RDKK dengan kondisi riil petani di lapangan.

7. Hasil penelitian (Tyas, Rohmah, dan Lestari, 2023)

Penelitian Tyas, Rohmah, dan Lestari yang berjudul *“Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Tingkat Petani Kecamatan Buay Pemuka Peliung Ditinjau Dari Segi Ketepatan Tempat, Jumlah, Harga, Jenis, Waktu Dan Mutu”* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan petani, perangkat desa, dan pengecer pupuk. Tujuan utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana implementasi kebijakan subsidi pupuk sesuai dengan prinsip 6T, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, waktu, tempat, dan harga. Hasil temuan menunjukkan bahwa implementasi masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek waktu dan harga. Keterlambatan distribusi dan adanya selisih harga dari HET menjadi hambatan utama. Selain itu, lemahnya sosialisasi menyebabkan banyak petani tidak memahami mekanisme baru seperti kartu tani dan e-RDKK.

8. Hasil penelitian (Famela, Prayudhi, Zamrodah, dan Widiyatmanta, 2023)

Penelitian Famela, Prayudhi, Zamrodah, dan Widiyatmanta yang berjudul *“Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wonotirto”* menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dengan kelompok tani, serta pihak distributor. Tujuannya adalah untuk merumuskan strategi penyaluran yang tepat dalam wilayah pesisir selatan Kabupaten Blitar. Hasil kajian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penyaluran pupuk subsidi di daerah ini adalah jauhnya jarak tempuh antar wilayah, minimnya jumlah pengecer resmi, dan ketergantungan petani pada satu jenis pupuk. Penelitian ini mengusulkan beberapa strategi seperti peningkatan jumlah kios pengecer, pemetaan zona distribusi berdasarkan musim tanam, serta penggunaan sistem daring berbasis Android untuk pendataan dan pemantauan distribusi pupuk.

9. Hasil penelitian (Setiawan, et. al, 2024)

Penelitian Setiawan, et. al. yang berjudul *“Sosialisasi dan Mekanisme Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Kelompok Tani Mekar Baru, Kabupaten Bengkayang”* menyoroti aspek penyuluhan dan pemahaman petani terhadap regulasi pupuk subsidi. Menggunakan metode studi kasus dan observasi partisipatif, penelitian ini bertujuan mengevaluasi

sejauh mana efektivitas sosialisasi pemerintah terhadap petani dalam memahami hak dan prosedur mendapatkan pupuk bersubsidi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum memahami detail proses pendaftaran RDKK dan penggunaan kartu tani. Penyebab utamanya adalah kurangnya tenaga penyuluh, jarang diadakannya pertemuan kelompok tani, dan masih rendahnya tingkat literasi digital petani. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran penyuluh lapangan dan program penyuluhan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

10. Hasil penelitian (Wijayanti, Ayu, Rahayu, dan Usman, 2022)

Penelitian Wijayanti, Ayu, Rahayu, dan Usman yang berjudul "*Evaluasi Sistem Distribusi Pupuk dalam Mendukung Ketersediaan dan Stabilitas Harga di Tingkat Petani*" menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang dilaksanakan di Kecamatan Utan dan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem distribusi pupuk bersubsidi dari distributor ke petani dan memberikan usulan perbaikan distribusi. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara regulasi pendistribusian pupuk telah sesuai dengan peraturan, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan dalam aspek ketepatan jumlah, waktu, harga, dan jenis. Nilai R Square sebesar 0,06 mencerminkan lemahnya efektivitas distribusi yang ada, sehingga perlu peningkatan sistem distribusi dan penguatan peran kelembagaan lokal.

11. Hasil penelitian (Khaq dan Biswan, 2025)

Penelitian Khaq dan Biswan (2025) yang berjudul "*Optimalisasi Subsidi Pupuk: Mengatasi Inefisiensi Biaya dan Mekanisme Distribusi di Indonesia*" menyampaikan sebuah analisis kebijakan berbasis studi literatur dan data sekunder mengenai pemborosan anggaran dalam sistem subsidi pupuk nasional. Penelitian ini menyoroti ketidakefisienan biaya yang timbul akibat distribusi yang tidak tepat sasaran, tumpang tindih data petani, dan manipulasi penggunaan kartu tani. Studi ini menyarankan langkah-langkah reformasi, seperti integrasi data Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan Dukcapil, pembenahan sistem e-RDKK

berbasis geospasial, serta peningkatan transparansi penyaluran pupuk melalui dashboard publik.

Beberapa penelitian terdahulu diatas dirangkum menjadi bentuk tabel akan menjadi sebagai berikut:

**Tabel 2. 1** Penelitian Terdahulu

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	<i>Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan (Jamil, 2023)</i>	Koordinasi antar aktor kebijakan masih lemah, berdampak pada distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran.	Menyoroti peran aktor dan kelembagaan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.	Fokus pada peran dan sinergi antaraktor kebijakan secara nasional, bukan pada tata niaga di daerah tertentu.
2.	<i>Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone (Ramlayana et al., 2020)</i>	Penyaluran efektif pada jenis dan jumlah, namun tidak efektif pada harga dan waktu karena keterlambatan dan biaya tambahan.	Mengevaluasi efektivitas penyaluran pupuk subsidi berdasarkan prinsip ketepatan.	Lokasi berbeda (Bone), dan tidak secara eksplisit membahas sistem tata niaga sebagai kelembagaan.
3.	<i>Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Wijayanto &amp; Lestari, 2022)</i>	Implementasi kartu tani sesuai prosedur, tapi tidak optimal karena hambatan akses, validasi RDKK, dan jaringan.	Membahas distribusi pupuk dan tantangan implementasi di lapangan.	Fokus pada program kartu tani dan regulasi di Jawa Tengah, bukan pada tata niaga kelembagaan lokal.
4.	<i>Analisis Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi di</i>	Distribusi belum tepat jumlah, waktu, dan lokasi	Membahas sistem distribusi dan	Fokus pada CV (distributor swasta), bukan

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Kabupaten Simalungun</i> <b>(Lumban Gaol et al., 2023)</b>	karena kendala administratif dan lemahnya koordinasi.	tantangan di tingkat pelaksana.	fokus pada keseluruhan tata niaga pupuk.
5.	<i>Strategi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Walenrang Timur</i> <b>(Nuryanti et al., 2025)</b>	Diperlukan integrasi sistem dan peningkatan kapasitas petani agar distribusi lebih merata dan efisien.	Menyoroti distribusi pupuk dan kelembagaan.	Penelitian menggunakan analisis SWOT, dan berlokasi di Sulawesi Selatan.
6.	<i>Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago</i> <b>(Anisa &amp; Adnan, 2021)</b>	Permasalahan teknis seperti EDC error dan minimnya sosialisasi menyebabkan ketidakefektifan kartu tani.	Mengevaluasi efektivitas penyaluran pupuk kepada petani.	Fokus pada evaluasi teknis program kartu tani, bukan sistem tata niaga kelembagaan.
7.	<i>Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Tingkat Petani Kecamatan Buay Pemuka Pelung</i> <b>(Tyas et al., 2023)</b>	Masih ada kendala dalam waktu dan harga, serta lemahnya pemahaman petani tentang mekanisme distribusi.	Menilai efektivitas distribusi pupuk dengan prinsip 6T.	Penelitian tidak secara khusus membahas tata niaga pupuk atau organisasi penyalur.
8.	<i>Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wonotirto</i> <b>(Famela et al., 2023)</b>	Ditemukan hambatan geografis dan keterbatasan kios, disarankan penggunaan teknologi digital dan zonasi distribusi.	Mengkaji distribusi pupuk di daerah pedesaan.	Fokus pada strategi pemetaan dan digitalisasi distribusi di daerah pesisir Blitar.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
9.	<i>Sosialisasi dan Mekanisme Mendapatkan Pupuk Bersubsidi di Kelompok Tani Mekar Baru</i> <b>(Setiawan et al., 2024)</b>	Sosialisasi yang minim dan kurangnya penyuluh membuat petani kesulitan mengakses pupuk bersubsidi.	Membahas akses petani terhadap pupuk bersubsidi.	Fokus pada pemahaman petani terhadap regulasi, bukan sistem tata niaga keseluruhan.
10.	<i>Evaluasi Sistem Distribusi Pupuk dalam Mendukung Ketersediaan dan Stabilitas Harga di Tingkat Petani</i> <b>(Wijayanti et al., 2022)</b>	Distribusi belum tepat jumlah, harga, waktu; nilai $R^2 = 0,06$ menunjukkan efektivitas distribusi masih lemah.	Membahas distribusi pupuk dari distributor ke petani dan kendalanya.	Menggunakan SEM dan gabungan data kuantitatif di Sumbawa, berbeda pendekatan dan lokasi.
11.	<i>Optimalisasi Subsidi Pupuk: Mengatasi Inefisiensi Biaya dan Mekanisme Distribusi di Indonesia</i> <b>(Khaq &amp; Biswan, 2025)</b>	Disarankan reformasi sistem melalui integrasi data geospasial, pembenahan e-RDKK, dan transparansi digital.	Menyoroti masalah distribusi pupuk dan inefisiensi sistem subsidi.	Fokus pada skala nasional dan pendekatan kebijakan makro, bukan studi lapangan lokal.

Sumber: Jurnal yang dipublikasi 2020-2025

Berdasarkan uraian penelitian terhadulu diatas dalam kajian pustaka setiap wilayah memiliki kendala yang beragam dalam proses distribusi pupuk. Secara keseluruhan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata niaga memiliki peran yang signifikan dalam proses distribusi pupuk bersubsidi sampai pada tingkat petani.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya melalui lokasi dan objek penelitian yang berbeda, serta hasil analisis yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya, seperti kelembagaan yang terlibat dalam tata niaga pupuk bersubsidi yang menjadi fokus penelitian.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya dalam mengatur, mengarahkan, dan menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Secara umum, kebijakan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk keputusan, tindakan, atau program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga yang memiliki kewenangan, dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak hanya menyangkut keputusan politik yang bersifat makro, tetapi juga mencakup kebijakan teknis pada level administratif yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat sehari-hari.

Menurut William N. Dunn (1999), kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan, yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukanlah keputusan tunggal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari suatu rangkaian proses yang terstruktur. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai sebuah siklus yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yang saling berhubungan dan berkesinambungan. Tahapan kebijakan publik dibagi ke dalam lima tahap utama, yaitu:

1. Tahap Perumusan Masalah, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Tahap Peramalan (*Forecasting*), yaitu memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan.
3. Tahap Rekomendasi Kebijakan, yaitu menyajikan informasi mengenai manfaat dari setiap alternatif kebijakan dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat paling tinggi.
4. Tahap Monitoring Kebijakan, yaitu memberikan informasi mengenai konsekuensi-konsekuensi saat ini dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan, yaitu memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan (Dunn, 1999).

Dalam literatur kebijakan publik, model tahapan ini dianggap penting karena menggambarkan bahwa kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang tidak pernah berhenti. Setiap kebijakan yang dievaluasi dapat memunculkan kembali identifikasi masalah baru sehingga siklus terus berulang. Hal ini sejalan dengan pandangan Thomas R. Dye (1992) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut menekankan pada tiga aspek, yaitu tindakan nyata pemerintah, alasan di balik tindakan tersebut, serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat.

Salah satu peran paling mendasar dari kebijakan publik adalah dalam bidang ekonomi. Pemerintah tidak bisa hanya menjadi pengamat dalam mekanisme pasar, melainkan harus berperan aktif dalam menciptakan regulasi maupun program untuk mengatasi berbagai ketidaksempurnaan pasar. Dalam ilmu ekonomi publik, pemerintah dipandang memiliki peran sebagai “penjaga keseimbangan” ketika pasar gagal berfungsi dengan baik (*market failure*).

Joseph Stiglitz (2019), menekankan bahwa kegagalan pasar dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti monopoli, eksternalitas negatif, serta kegagalan penyediaan barang publik, seperti jalan raya, pertahanan negara, atau layanan kesehatan dasar. Dalam kondisi tersebut, peran pemerintah melalui kebijakan publik menjadi mutlak diperlukan. Ketika terjadi monopoli, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi anti-monopoli atau kebijakan persaingan usaha yang sehat. Demikian pula, ketika muncul eksternalitas negatif, seperti pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri, pemerintah harus turun tangan melalui regulasi lingkungan, pajak karbon, atau skema perdagangan emisi.

Selain itu, kebijakan publik juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Tanpa intervensi pemerintah, mekanisme pasar cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki modal besar. Oleh karena itu, pemerintah biasanya menggunakan instrumen fiskal, seperti pajak progresif atau subsidi, untuk mendorong pemerataan kesejahteraan. Subsidi pupuk di Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan publik digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi, kebijakan publik dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama sebagaimana dikemukakan oleh Howlett & Ramesh (2020):

1. Efisiensi (*efficiency*): Mengukur sejauh mana manfaat kebijakan yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efisiensi menjadi sangat penting dalam kondisi keterbatasan anggaran, di mana pemerintah dituntut untuk menghasilkan output maksimal dengan input minimal.
2. Keadilan (*equity*): Menilai apakah kebijakan publik mampu mendistribusikan manfaat secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Prinsip *equity* menjadi krusial agar kebijakan publik tidak hanya menguntungkan kelompok elit atau wilayah tertentu, tetapi juga menjangkau seluruh rakyat.
3. Keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*): Mengukur kemampuan pemerintah dalam membiayai kebijakan tersebut dalam jangka panjang tanpa menimbulkan defisit anggaran yang berlebihan atau beban utang yang tinggi. Aspek ini penting agar kebijakan yang dirancang tidak hanya bersifat populis jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.

### 2.2.2 Subsidi

Subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk menurunkan harga barang atau jasa sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Dalam konteks ekonomi publik, subsidi dapat berbentuk bantuan langsung tunai, potongan harga, atau insentif fiskal yang diberikan kepada produsen maupun konsumen. Subsidi berfungsi untuk mengoreksi kegagalan pasar, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mendorong pemerataan akses terhadap kebutuhan pokok. Subsidi di Indonesia banyak digunakan untuk sektor strategis seperti energi, pangan, pendidikan, dan kesehatan, dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi (Rachman, 2022).

Kebijakan subsidi juga memiliki implikasi fiskal yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja subsidi yang besar dapat mengurangi ruang fiskal untuk program pembangunan lainnya. Tantangan utama kebijakan subsidi di Indonesia adalah menyeimbangkan antara tujuan sosial dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah diharapkan mampu merancang subsidi yang bersifat produktif, yakni mendorong peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah, bukan

hanya bersifat konsumtif. Dengan demikian, peran subsidi tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sektor pangan memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sektor ini juga memengaruhi stabilitas sosial dan politik. Ketahanan pangan yang terjaga akan mengurangi risiko inflasi pangan, menjaga nilai tukar petani, serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan subsidi pangan sebagai salah satu kebijakan prioritas. Terdapat berbagai subsidi dalam sektor pangan. Pertama, subsidi pupuk. Pupuk merupakan input penting bagi produksi pertanian. Tanpa pupuk yang cukup dan terjangkau, produktivitas tanaman pangan akan menurun drastis. Oleh sebab itu, pemerintah sejak lama memberikan subsidi pupuk dengan mekanisme subsidi harga, yaitu menanggung selisih antara harga pasar dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurut Bahriyah (2023), kebijakan ini membantu petani kecil memperoleh pupuk dengan harga lebih murah sehingga mampu meningkatkan produktivitas padi, jagung, kedelai, dan komoditas pangan strategis lainnya. Kedua, subsidi benih dan bantuan sarana produksi pertanian. Selain pupuk, pemerintah juga memberikan subsidi benih unggul, baik untuk padi, jagung, maupun hortikultura. Benih unggul bersubsidi berfungsi memperbaiki produktivitas lahan dengan varietas yang tahan hama, berumur pendek, atau adaptif terhadap perubahan iklim. Menurut Badan Pangan Nasional (2022), distribusi benih bersubsidi membantu percepatan program swasembada pangan, sekaligus menekan ketergantungan pada impor. Ketiga, Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sejak 2017, pemerintah meluncurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang ditujukan bagi keluarga miskin. Program ini memberikan bantuan dalam bentuk saldo elektronik untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras dan telur di e-warung. BPNT dirancang untuk menggantikan distribusi beras raskin (beras untuk rumah tangga miskin) yang sebelumnya banyak menuai kritik. Hidayat & Hanri (2023) mengungkapkan bahwa BPNT memiliki keunggulan terhadap fleksibilitas pilihan pangan oleh kelompok penerima. Keempat, subsidi harga dan operasi pasar. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah juga melakukan subsidi harga melalui mekanisme operasi pasar. Bulog, contohnya, melakukan penyaluran beras medium dengan harga yang lebih

rendah ketika harga pasar melonjak. Strategi ini berfungsi menahan laju inflasi pangan yang berpotensi mengganggu daya beli masyarakat.

Tantangan utama subsidi adalah bagaimana memastikan subsidi tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Subsidi konsumtif hanya menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tanpa mendorong peningkatan kapasitas produksi. Sebaliknya, subsidi produktif, seperti pupuk, benih unggul, dan sarana produksi, dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan impor. Selain itu, diperlukan tata kelola yang lebih baik agar subsidi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai target.

### **2.2.3 Pupuk Bersubsidi**

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan pertanian. Keberadaan pupuk, baik organik, anorganik, maupun formulasi berimbang, berperan sentral dalam meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Tanpa pemupukan yang memadai, produktivitas lahan pertanian menurun, efisiensi serapan hara memburuk, dan hasil panen tidak stabil. Di negara agraris seperti Indonesia, di mana jutaan rumah tangga bergantung pada pertanian sebagai sumber penghidupan, ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau menjadi prasyarat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani, stabilitas pendapatan petani, dan ketahanan pangan nasional.

Dinamika biaya produksi pupuk global, fluktuasi harga bahan baku (terutama gas alam untuk pupuk nitrogen), serta kebutuhan logistik domestik yang luas, membuat harga pupuk komersial kerap di luar jangkauan banyak petani kecil. Untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan agronomis dan kemampuan bayar petani, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyelenggarakan kebijakan pupuk bersubsidi. Kebijakan ini dirancang sebagai bentuk intervensi terarah agar pupuk tetap terjangkau pada titik akhir, sehingga petani dapat mengadopsi dosis pemupukan yang sesuai rekomendasi teknis dan meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan.

Secara regulatif, pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang merinci jenis pupuk yang disubsidi, alokasi, dan mekanisme penyaluran. Instrumen yang digunakan adalah subsidi harga, yakni pemerintah menanggung selisih antara harga pasar dan Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga

petani membeli pada harga yang telah ditetapkan. Desain ini memudahkan perencanaan usaha tani karena harga input kunci, dalam hal ini pupuk, lebih pasti dan stabil di tingkat petani. Sejalan dengan itu, Bahriyah (2023) menekankan bahwa skema subsidi harga, apabila dikombinasikan dengan tata kelola distribusi yang rapi serta edukasi pemupukan berimbang, berpotensi meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama.

Pada tataran makro, kebijakan pupuk bersubsidi merupakan bagian integral dari strategi ketahanan pangan nasional. Dengan menjaga keterjangkauan sarana produksi, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas komoditas strategis seperti padi, jagung, dan kedelai. Produktivitas yang lebih tinggi berdampak pada pasokan domestik yang lebih kuat, mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga internasional, dan memperbaiki neraca perdagangan pangan melalui penekanan impor komoditas tertentu. Selain aspek volume, ketersediaan pupuk pada harga yang terkendali juga mendukung daya saing produk pertanian nasional di pasar domestik dan regional, terutama ketika diintegrasikan dengan praktik budidaya unggul, benih bermutu, dan irigasi yang andal.

Di luar aspek produksi, kebijakan ini menyentuh dimensi kesejahteraan pedesaan. Biaya input yang lebih terjangkau membantu margin usaha tani menjadi lebih baik, memberikan ruang bagi petani untuk menginvestasikan kembali sebagian pendapatan pada perbaikan lahan, diversifikasi tanaman, atau adopsi teknologi. Dalam jangka menengah, perbaikan ekonomi rumah tangga tani memberi *multiplier effect* pada aktivitas ekonomi desa, dari jasa alsintan, toko saprotan, hingga layanan keuangan mikro.

Ketersediaan pupuk bersubsidi yang konsisten bergantung pada beberapa unsur yang saling menguatkan. Pertama, kebijakan pemerintah. Pemerintah menetapkan payung hukum, kriteria penerima, komoditas prioritas, serta HET. Digitalisasi perencanaan melalui instrumen, seperti Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berbasis data menjadi landasan perencanaan alokasi yang lebih presisi. Kedua, kemampuan industri pupuk domestik, mulai dari bahan baku, utilitas pabrik, hingga efisiensi produksi, menjadi jangkar utama. Perusahaan-perusahaan pupuk nasional meningkatkan reliabilitas pasok dengan pemeliharaan fasilitas, diversifikasi sumber bahan baku, dan optimalisasi rantai pasok. Program revitalisasi pabrik (retrofit) dan

efisiensi energi membantu menahan biaya produksi agar ruang fiskal subsidi tetap terkendali. Ketiga, penguatan jalur distribusi. Indonesia memiliki geografi kepulauan yang menantang. Jalur distribusi berjenjang, produsen, pelaku usaha distribusi, dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer), perlu beroperasi dengan standar pelayanan yang jelas, transparan, dan terdokumentasi. Pemanfaatan sistem informasi untuk pelacakan pergerakan barang hingga titik pengecer memperkuat visibilitas dan akuntabilitas aliran barang, sekaligus memudahkan audit kepatuhan HET. Keempat, permintaan petani. Permintaan mengikuti kalender tanam dan rekomendasi dosis. Penyuluh, kios pengecer, dan kelompok tani berperan penting menyelaraskan permintaan dengan alokasi. Edukasi tentang takaran tepat (*right rate*), waktu tepat (*right time*), cara tepat (*right method*), dan jenis tepat (*right source*) mendorong penggunaan pupuk yang efisien.

#### 2.2.4 Tata Niaga

Tata niaga adalah suatu sistem pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan distribusi barang dan jasa mulai dari produsen hingga ke konsumen akhir dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Tata niaga tidak hanya mengatur arus barang tetapi juga mencakup mekanisme harga, standar mutu, dan regulasi pasar yang memastikan distribusi berjalan dengan baik (Siregar dan Anggraini, 2023). Dalam konteks perekonomian Indonesia, tata niaga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga komoditas strategis, termasuk bahan pangan, energi, dan pupuk.

Prinsip utama dalam tata niaga meliputi kepastian pasokan, keterjangkauan harga, kemudahan akses, serta pemerataan distribusi. Efektivitas tata niaga sangat bergantung pada koordinasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen. Tata niaga yang baik mampu mengurangi disparitas harga antarwilayah, meminimalisir penimbunan barang, dan memperpendek rantai distribusi sehingga biaya yang ditanggung konsumen menjadi lebih rendah (Sekar et al., 2024).

Dalam tata niaga modern, sistem distribusi tidak lagi mengandalkan pola tradisional yang panjang, tetapi mulai memanfaatkan teknologi informasi, logistik terintegrasi, dan basis data terpusat. Penerapan *supply chain management* yang memanfaatkan platform digital untuk memantau stok, permintaan, dan harga di setiap

titik distribusi. Digitalisasi tata niaga di sektor pertanian Indonesia, termasuk pupuk, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi (Bahriyah, 2023).

Tata niaga yang efektif memerlukan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, serta dukungan teknologi. Banyak negara, termasuk Indonesia, peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator distribusi barang sangat vital. Pemerintah bertugas menetapkan kebijakan harga, mengatur pelaku pasar, dan memastikan barang-barang strategis tetap tersedia.

Tata niaga pupuk bersubsidi merupakan sistem pengelolaan dan mekanisme penyaluran pupuk subsidi dari produsen hingga ke tangan petani yang berhak. Sistem ini mencakup aspek pengadaan, distribusi, pengawasan, dan pembinaan yang dilaksanakan oleh berbagai aktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, produsen pupuk, pelaku usaha distribusi (distributor), dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer).

Tata niaga menjadi bagian penting dalam kebijakan subsidi pupuk karena menentukan efektivitas program pemerintah dalam menjamin ketersediaan pupuk secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025, tata niaga pupuk bersubsidi harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam konteks ini, tata niaga berperan bukan hanya sebagai proses distribusi fisik, melainkan juga mencakup manajemen data (melalui sistem e-RDKK), pengaturan kuota alokasi, serta kontrol harga eceran tertinggi (HET). Ketidaktepatan pada salah satu aspek tata niaga dapat menyebabkan terganggunya sistem distribusi pupuk dan berdampak langsung pada produktivitas pertanian.

Kelembagaan merupakan elemen penting dalam sistem tata niaga pupuk. Peran kelembagaan mencakup perencanaan kebutuhan, pendataan petani, pengawasan distribusi, serta edukasi kepada petani. Kelembagaan yang solid dan terkoordinasi baik akan menciptakan sistem distribusi yang efisien.

Unsur-unsur ketersediaan pupuk subsidi juga melibatkan aspek ekonomi, dimana faktor seperti harga bahan baku, biaya produksi, dan kebijakan harga pupuk dapat mempengaruhi produksi dan distribusi. Keterlibatan sektor swasta dalam rantai pasok pupuk juga menjadi kunci, karena produsen, pelaku usaha distribusi

(distributor), dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer) memainkan peran penting dalam memastikan pupuk dapat sampai ke tangan petani dengan efisien. Selain itu faktor cuaca dan iklim juga dapat memengaruhi produksi bahan baku pupuk dan distribusi secara keseluruhan. Keseluruhan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menjaga ketersediaan pupuk subsidi yang stabil dan memadai.

Efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi sangat berpengaruh terhadap pencapaian ketahanan pangan, khususnya dalam menjaga produktivitas petani skala kecil. Distribusi pupuk bersubsidi yang lancar dan tepat sasaran akan meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi, dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, penilaian terhadap efektivitas tata niaga harus mencakup indikator pelayanan publik, seperti ketepatan waktu, ketepatan jumlah, serta persepsi kepuasan dari petani penerima manfaat.

### **2.2.5 Produktivitas Pertanian**

Produktivitas pertanian merupakan salah satu indikator fundamental dalam mengukur efisiensi sistem produksi pertanian serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian memiliki peran strategis, tidak hanya dalam memperkuat ketahanan pangan tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Saputri et al. (2024) menemukan bahwa produktivitas pertanian di Provinsi Bangka Belitung memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, di mana variabel ini mampu menjelaskan 81,6% variasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian tidak hanya berdampak pada penyediaan pangan, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan ekonomi daerah secara luas.

Penelitian Jannah et al. (2023) mengenai hubungan antara produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, menemukan bahwa faktor seperti kualitas tanah, modal, dan manajemen produksi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas padi. Lebih lanjut, peningkatan produktivitas terbukti secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tani. Hasil ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan produktivitas

sektor primer dapat menjadi pendorong distribusi pendapatan yang lebih merata di pedesaan.

Secara konseptual, peningkatan produktivitas pertanian dapat dicapai melalui pendekatan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memaksimalkan hasil dari lahan yang ada melalui penggunaan teknologi, perbaikan manajemen, dan peningkatan kualitas input. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas lahan garapan. Dalam konteks keberlanjutan lingkungan, strategi intensifikasi yang ramah lingkungan lebih diutamakan, mengingat keterbatasan lahan pertanian dan tekanan terhadap sumber daya alam.

Produktivitas pertanian bukan sekadar ukuran output, melainkan mencerminkan kualitas sistem produksi secara keseluruhan, termasuk aspek manajerial, teknologi, infrastruktur, dan kebijakan publik. Peningkatan produktivitas tidak hanya menjadi tujuan sektor pertanian itu sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **2.2.6 Teori Keagenan**

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu kerangka teoretis yang banyak digunakan dalam ilmu ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu administrasi negara untuk memahami relasi yang terjadi antara dua pihak yang memiliki peran berbeda, yaitu prinsipal (pemberi mandat) dan agen (penerima mandat). Hubungan ini muncul ketika seorang prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk bertindak atas nama mereka dalam mencapai tujuan tertentu. Teori ini pertama kali dikembangkan secara formal oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling dalam artikelnya tahun 1976 berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Dalam kerangka ini, Jensen dan Meckling menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dan masalah asimetri informasi antara prinsipal dan agen yang dapat memunculkan apa yang disebut sebagai *agency problem*, yaitu ketika agen tidak sepenuhnya bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal karena adanya tujuan yang berbeda atau kurangnya pengawasan yang efektif.

Dalam banyak kebijakan publik, termasuk dalam distribusi subsidi pemerintah, hubungan antara negara (pemerintah) sebagai prinsipal dan berbagai pelaksana kebijakan di lapangan sebagai agen menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Teori

keagenan dapat digunakan untuk memahami kompleksitas hubungan dan potensi *moral hazard* dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang melibatkan banyak aktor non-pemerintah, termasuk swasta dan masyarakat sipil.

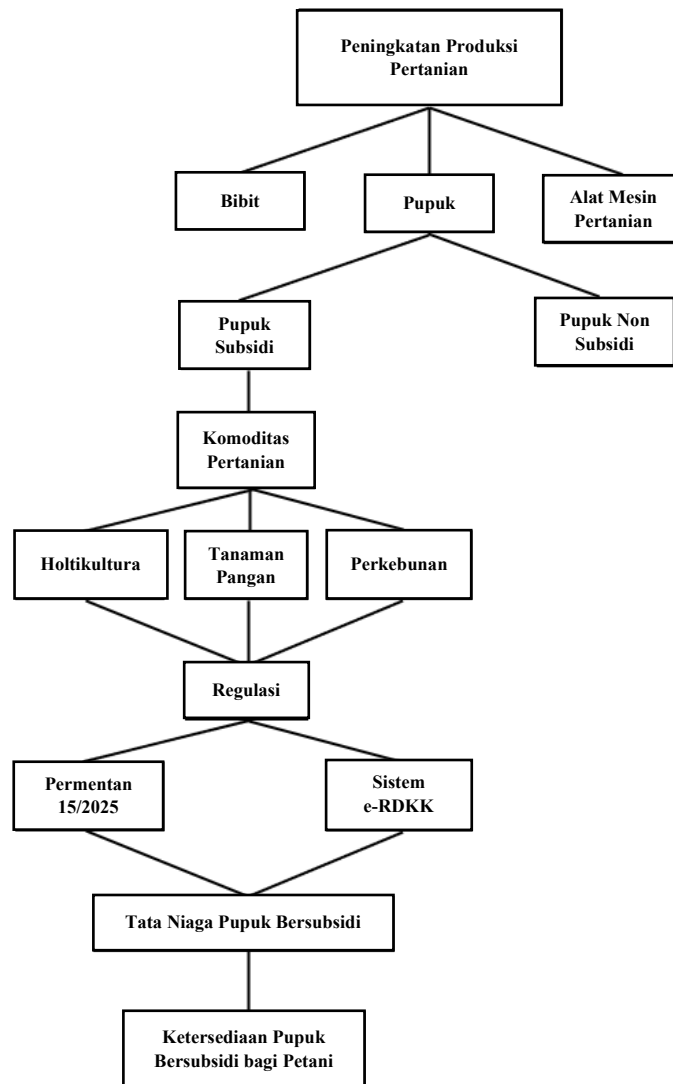
Dalam konteks kebijakan pupuk bersubsidi, teori keagenan menjadi kerangka yang tepat untuk menjelaskan interaksi antara pemerintah sebagai prinsipal dan para aktor pelaksana seperti pelaku usaha distribusi (distributor) dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer) sebagai agen. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian memiliki tujuan utama untuk mendorong produktivitas sektor pertanian, menjamin keberlanjutan produksi pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani kecil melalui ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah merancang mekanisme subsidi pupuk yang diatur melalui sistem perencanaan kebutuhan pupuk (e-RDKK), HET, serta jalur distribusi resmi yang diawasi secara berjenjang mulai dari produsen hingga pengecer.

Masalah asimetri informasi juga sangat menonjol dalam kasus ini. Agen yang berada di lapangan biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi faktual. Sebaliknya, prinsipal (dalam hal ini pemerintah pusat) bergantung pada laporan dan data administratif yang sering kali tidak akurat atau tertunda. Williamson (1985) menyebut bahwa dalam kondisi seperti ini, kontrak atau kebijakan tidak dapat sepenuhnya menutup celah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki agen.

Dengan demikian, teori keagenan memberikan kerangka penting untuk memahami bahwa keberhasilan kebijakan pupuk bersubsidi tidak hanya bergantung pada rancangan kebijakannya, tetapi juga pada efektivitas hubungan antara prinsipal dan agen. Tanpa adanya sistem insentif yang selaras, pengawasan yang memadai, dan penyelarasan tujuan antara pemerintah dan pelaksana di lapangan, maka kebijakan ini akan tetap menghadapi masalah kebocoran, penyalahgunaan, dan ketidaktepatan sasaran.

### 2.3 Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini membentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2. 1** Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi subjek atau objek penelitian, baik itu individu, lembaga, komunitas, maupun entitas lainnya. Metode ini berfokus pada pemahaman fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan data yang detail dan komprehensif, dengan penekanan pada keluasan informasi dan ketelitian dalam pengkajian data yang diperoleh.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif dan pengalaman partisipan secara mendalam mengenai peran tata niaga pupuk bersubsidi terhadap ketersediaan pupuk bagi petani di Kabupaten Sleman.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berperan sebagai tempat bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Selain itu, lokasi tersebut menjadi sarana bagi peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sentra pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap produksi pangan daerah, khususnya komoditas padi dan hortikultura. Peneliti memilih Kapanewon Seyegan, Kapanewon Mlati, dan Kapanewon Prambanan sebagai sampel lokasi yang dipilih secara *purposive* berdasarkan intensitas kegiatan pertanian. Ketiga kapanewon tersebut memiliki karakteristik pertanian yang cukup beragam, baik dari segi luas lahan, pola tanam, dan komoditas pertanian yang ditanam.

Kapanewon Seyegan dikenal sebagai wilayah dengan dominasi lahan sawah produktif yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi sangat memengaruhi keberlanjutan produksi. Kapanewon Mlati, meskipun berada di kawasan yang lebih dekat dengan pusat perkotaan, masih memiliki

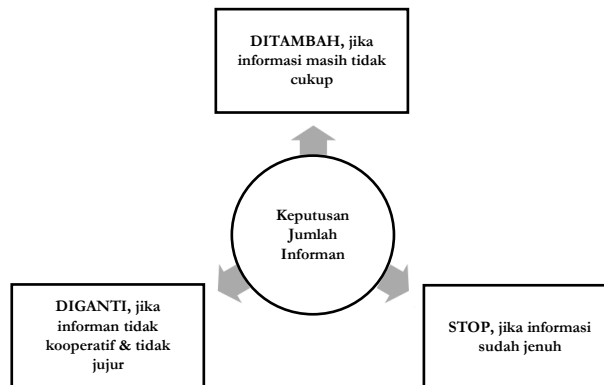
sentra pertanian yang aktif, namun menghadapi tantangan distribusi pupuk akibat alih fungsi lahan. Sementara itu, Kapanewon Prambanan memiliki kondisi geografis yang berbeda, sehingga dapat memberikan perspektif tambahan mengenai variasi distribusi pupuk di wilayah dengan kondisi topografi yang lebih kompleks. Dengan demikian, penelitian di wilayah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran tata niaga pupuk bersubsidi terhadap ketersediaan pupuk bagi petani di berbagai kondisi lapangan di Kabupaten Sleman.

### **3.3 Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penentuan informan atau subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan teknik ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti memilih informan yang telah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria tersebut disusun untuk memastikan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai topik yang dikaji, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pemilihan informan mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, informan harus memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait pertanyaan dan isu yang diangkat dalam penelitian. Pengetahuan ini memungkinkan mereka memberikan informasi yang relevan, detail, dan sesuai dengan konteks permasalahan. Kedua, informan terlibat dalam distribusi pupuk bersubsidi yang memahami dan terlibat langsung di lapangan. Ketiga, informan diharapkan memiliki sikap netral, yaitu tidak menunjukkan keberpihakan atau kecenderungan menjatuhkan pihak tertentu, baik individu, lembaga, maupun perusahaan.

Dengan pertimbangan tersebut, peneliti berupaya mendapatkan informan yang benar-benar memahami substansi permasalahan yang diteliti. Pemilihan yang tepat diharapkan menghasilkan data yang valid, akurat, dan dapat menjadi dasar analisis yang kuat.



**Gambar 3. 1** Keputusan Menambah, Mengurangi, atau Mengganti Informan

Gambar 3.1 menunjukkan proses pengambilan keputusan terkait jumlah informan dalam penelitian kualitatif. Jika informasi yang diperoleh masih dirasa belum cukup, maka jumlah informan perlu ditambah. Apabila informan yang ada tidak kooperatif atau tidak jujur dalam memberikan keterangan, maka informan tersebut perlu diganti. Sementara itu, jika data yang diperoleh sudah dianggap memadai dan mencapai titik kejenuhan informasi, maka proses penambahan informan dapat dihentikan. Dengan demikian, keputusan jumlah informan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Adapun informan yang dinilai paling mengetahui dan memahami permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1** Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Siti Ruchayah Dwi Mulyani	Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman	Informan Kunci
2.	Erna Sulistiana	Staf PT. Pupuk Indonesia Holding Company Wilayah Jawa Tengah 3 dan Daerah Istimewa Yogyakarta	Informan Utama
3.	Saraswati	Penyuluh Pertanian Ahli Muda Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman	
4.	Pranawengdyah Kartika Dewi	Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) CV. Arka Adhi Kana	
5.	Suhesta Sigit	Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) CV. Karya Nyata	
6.	Hari Duta	Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) CV. Sri Agung Rejeki	
7.	Raminem	Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) KUD Seyegan	
8.	Darma Sunu	Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) UD Hadi Putro, Seyegan	
9.	Juwarni	Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) UD Tani Mas, Mlati	
10.	Tugiman	Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) UD Sumber Makmur, Mlati	
11.	Eli	Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) UD Madu Tani, Prambanan	

12.	Nasrul	Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) UD Salwa Tani, Prambanan	
13.	Gito	Petani	

Peneliti mengharapkan para informan dapat memberikan data hasil observasi yang mencakup berbagai sumber, seperti dokumen resmi, catatan lapangan, serta surat-surat apabila diperlukan. Selain itu, melalui wawancara, peneliti berharap memperoleh penjelasan yang lebih mendalam terkait gambaran topik yang diteliti. Sementara itu, melalui dokumentasi, diharapkan dapat diperoleh foto-foto wawancara dan dokumentasi ketersediaan pupuk bersubsidi di kios pengecer sebagai tempat penebusan pupuk oleh petani.

### 3.4 Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2015), validasi data dalam penelitian kualitatif merupakan tahap yang sangat penting karena kepercayaan terhadap hasil penelitian tidak dapat dibangun tanpa melalui proses pengujian terhadap data yang diperoleh dari partisipan. Pengujian data ini menjadi indikator kualitas penelitian agar dapat diakui sebagai penelitian ilmiah yang kredibel, serta memastikan keakuratan dan keandalan data yang telah dikumpulkan.

Sementara itu, Wijaya (2019) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah proses pemeriksaan atau pengecekan ulang data untuk menguji validitasnya. Dalam praktik sehari-hari, triangulasi ini mirip dengan konsep “cek dan ricek.” Teknik triangulasi melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber dan metode pengumpulan data, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi serta mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut.
2. Triangulasi metode, dilakukan dengan membandingkan data atau informasi menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data. Sebagai contoh, peneliti yang awalnya melakukan wawancara kemudian melengkapinya dengan observasi langsung untuk memastikan kesesuaian temuan.

3. Triangulasi waktu, dilakukan dengan melakukan pengecekan atau observasi pada waktu atau kesempatan yang berbeda, dengan memperhatikan bahwa pemilihan waktu tersebut tidak mempengaruhi perilaku subjek penelitian sehingga tidak memunculkan bias baru.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi waktu sebagai strategi utama untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh. Strategi ini dilakukan dengan mewawancarai informan pada waktu yang berbeda guna menilai konsistensi jawaban yang diberikan. Sebagai contoh, Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) CV. Arka Adhi Kana diwawancarai dalam dua waktu yang berbeda. Pada kedua wawancara tersebut, informan memberikan keterangan yang konsisten, yakni bahwa proses distribusi pupuk bersubsidi ke kios berjalan lancar sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan tanpa mengalami hambatan yang berarti. Konsistensi jawaban ini menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2018), terdapat beberapa teknik utama dalam pengumpulan data pada metode penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait objek yang diteliti.

#### **1.1. Observasi**

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau gejala yang muncul pada subjek penelitian. Menurut Zuriyah (2009), observasi melibatkan penggunaan pancaindra manusia untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian, mencakup perilaku, dinamika interaksi, serta situasi yang terjadi sesuai konteks pengamatan. Secara umum, observasi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas kelompok yang diteliti, dan observasi non partisipan, di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat tanpa keterlibatan langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, artinya peneliti mengamati objek penelitian dari luar tanpa berinteraksi langsung dalam kegiatan subjek penelitian.

### 2.1. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Zuriah (2009), wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan menerima jawaban secara langsung dari responden. Terdapat tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sehingga memudahkan peneliti memperoleh data sesuai tujuan penelitian.

### 3.1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis, visual, atau verbal yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Zuriah (2009), dokumentasi mencakup arsip, buku, teori, pendapat, maupun peraturan yang relevan. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa tulisan, foto, gambar, maupun karya monumental yang merekam peristiwa atau kegiatan tertentu. Metode dokumentasi sering digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara untuk memperkuat keakuratan data penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengambil gambar langsung di lapangan pada saat proses pengumpulan data berlangsung, sehingga menjadi bukti visual yang mendukung validitas temuan penelitian.

## 3.6 Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018) melibatkan langkah-langkah yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### 1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah langkah untuk menyederhanakan, merangkum, dan memilih elemen-elemen utama, serta mengklasifikasikan dan memfokuskan pada aspek yang penting dalam tema dan pola yang sama. Proses ini mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan berikutnya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti deskripsi ringkas, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya. Biasanya, penyajian data dalam penelitian kualitatif menggunakan format teks naratif, yang terkadang diperkaya dengan grafik, matriks, diagram, atau bentuk visual lainnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penelitian kualitatif menitikberatkan pada penemuan baru sebagai hasil utama dari kesimpulan yang diperoleh. Penemuan baru tersebut berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya kurang jelas atau tidak terdefiniskan dengan baik. Ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2018) bahwa penemuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya ambigu atau tidak jelas, tetapi setelah diteliti menjadi lebih jelas. Penemuan juga dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori baru.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.3.2 Gambaran Umum Kabupaten Sleman**

Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki posisi strategis, baik dari segi geografis maupun ekonomi. Wilayah ini berada di bagian utara DIY dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadikan Sleman sebagai pintu gerbang utama DIY dari arah barat, utara, dan timur. Posisi ini memberikan keuntungan strategis karena Sleman tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah DIY dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Sleman tercatat sebanyak 1.125.804 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 2.076,32 jiwa per km<sup>2</sup>. Angka tersebut menjadikan Sleman sebagai daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di DIY. Hal ini menunjukkan dinamika demografis yang kompleks, di mana pertumbuhan jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan terhadap lahan, perumahan, sarana prasarana publik, serta kebutuhan pangan. Luas wilayah Kabupaten Sleman sendiri mencapai 574,82 km<sup>2</sup>, atau sekitar 18% dari total luas wilayah Provinsi DIY (Pemerintah Kabupaten Sleman, 2023). Dengan wilayah yang relatif terbatas namun jumlah penduduk yang padat, Sleman menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan, keberlanjutan lingkungan, dan produktivitas sektor pertanian.

Dari sisi topografi, Kabupaten Sleman memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi. Bagian selatan didominasi dataran rendah yang mendukung perkembangan permukiman, pusat pendidikan, serta kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan bagian utara merupakan kawasan lereng Gunung Merapi yang dikenal memiliki tanah yang sangat subur akibat material vulkanik yang terus menerus disuplai dari aktivitas gunung berapi tersebut. Kondisi tanah yang subur ini menjadikan Sleman sebagai salah satu

lumbung pangan utama di DIY, terutama di wilayah utara dan timur yang dikenal sebagai sentra pertanian produktif.

Sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang penting perekonomian daerah. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, serta berbagai tanaman hortikultura. Selain itu, Kabupaten Sleman juga dikenal dengan produk pertanian khas, seperti salak pondoh yang telah menjadi ikon daerah dan memiliki daya saing di pasar nasional. Suburnya tanah di kawasan Sleman bagian utara tidak hanya mendukung pertanian tanaman pangan, tetapi juga mendorong berkembangnya sektor perkebunan, peternakan, dan bahkan agrowisata. Dengan semakin tingginya minat wisatawan terhadap pariwisata berbasis alam dan edukasi, pertanian di Sleman tidak hanya berfungsi sebagai penopang pangan, tetapi juga sebagai daya tarik wisata yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Sleman juga memiliki arti penting dari perspektif ketahanan pangan DIY. Dengan kondisi tanah yang subur dan kapasitas produksi pertanian yang tinggi, Sleman berkontribusi signifikan dalam penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Bahkan, hasil pertanian Sleman juga banyak disalurkan ke luar daerah, menjadikannya sebagai salah satu daerah penopang distribusi pangan di tingkat regional. Hal ini selaras dengan misi pemerintah daerah yang berkomitmen menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat daya saing produk pertanian lokal melalui inovasi dan digitalisasi pertanian.

Dengan demikian, Kabupaten Sleman dapat dipandang sebagai daerah dengan peran strategis multidimensi. Dari segi geografis, Sleman merupakan gerbang DIY dan wilayah penyangga utama Yogyakarta. Dari sisi ekonomi, Sleman adalah pusat pertanian, pendidikan, perdagangan, dan jasa yang saling melengkapi. Dari sisi sosial dan budaya, keberagaman aktivitas masyarakat menjadikan Sleman sebagai daerah yang dinamis, terbuka, sekaligus tetap menjaga kearifan lokal. Semua potensi ini menjadikan Sleman tidak hanya penting bagi DIY, tetapi juga memiliki posisi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah seluas 57.482 ha. Secara administratif, Kabupaten Sleman memiliki 17 kapanewon dan 86 kalurahan. Kabupaten Sleman memiliki luas lahan sawah hasil validasi dan verifikasi seluas 15.894,86 ha. Rincian luas

wilayah dan luas lahan sawah masing-masing kapanewon di Kabupaten Sleman terangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 4. 1** Daftar Luas Wilayah dan Luas Lahan Sawah dalam Hektar (Ha) masing-masing Kapanewon di Kabupaten Sleman

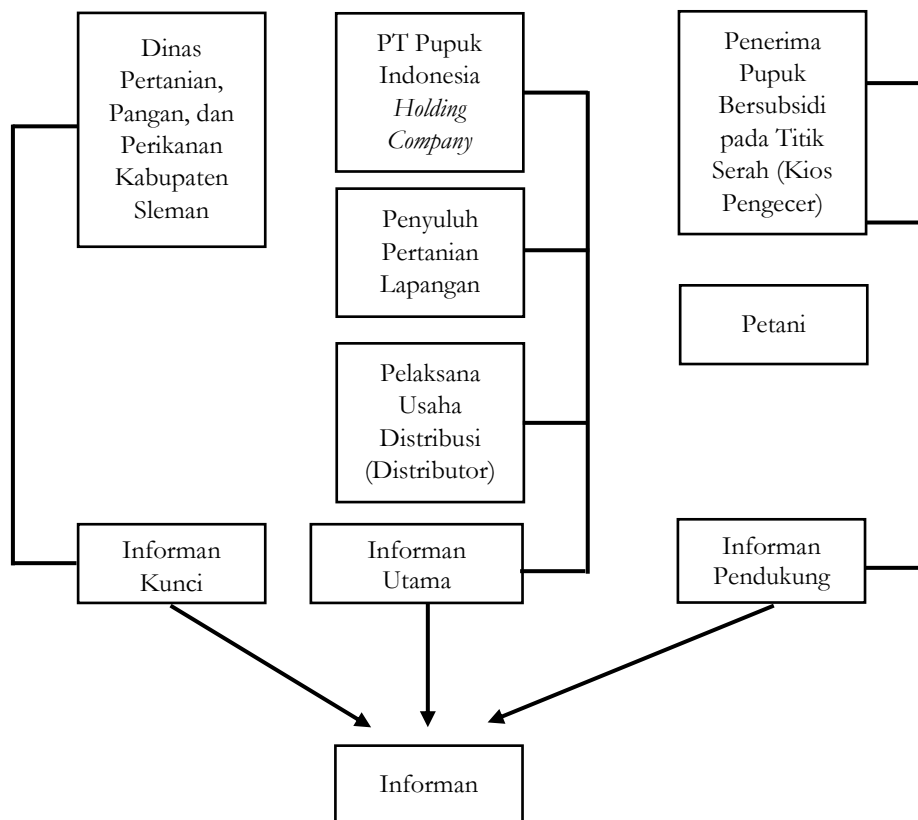
No	Kapanewon	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)
1.	Berbah	2.299	999,79
2.	Cangkringan	4.799	749,05
3.	Depok	3.555	217,30
4.	Gamping	2.925	612,33
5.	Godean	2.684	952,46
6.	Kalasan	3.584	1.314,72
7.	Minggir	2.727	1.119,38
8.	Mlati	2.852	699,03
9.	Moyudan	2.762	1.131,44
10.	Ngaglik	3.852	1.167,94
11.	Ngemplak	3.571	1.356,16
12.	Pakem	4.384	865,12
13.	Prambanan	4.135	1.095,42
14.	Seyegan	2.663	1.055,91
15.	Sleman	3.132	1.221,79
16.	Tempel	3.249	1.050,20
17.	Turi	4.309	286,92

Sumber: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman (2025)

#### 4.1.2 Gambaran Umum Informan Penelitian

Terdapat tiga belas informan dalam penelitian, termasuk satu informan kunci, yaitu Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman. Lima informan utama, yaitu satu pejabat PT. Pupuk Indonesia  *Holding Company* (Persero) Wilayah Jawa Tengah 3 dan Daerah Istimewa Yogyakarta, satu pejabat Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten

Sleman, dan tiga pelaku usaha distribusi. Terakhir, terdapat tujuh informan pendukung, yaitu enam penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (pengecer), dan satu petani. Informan yang dipilih memiliki pengetahuan tentang informasi atau masalah penelitian dan terlibat secara langsung dengan tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman. Informasi tambahan mengenai informan penelitian disajikan sebagai berikut:



**Gambar 4. 1** Gambaran Informan Penelitian

Untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan, para informan umumnya menjawab seluruh pertanyaan penelitian sebagai bentuk verifikasi atau penguatan data. Sebagian data diperoleh melalui wawancara yang memuat informasi terkait tata niaga pupuk bersubsidi, peran masing-masing pihak yang terlibat, ketersediaan pupuk bagi petani di tingkat kios pengecer, serta berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Jawaban yang diberikan mengacu pada pertanyaan survei, baik secara keseluruhan maupun per poin. Demikian beberapa kata kunci yang diberikan informan penelitian:



Hal pertama yang menarik dari hasil analisis ini adalah bahwa pupuk sebenarnya tersedia dengan cukup baik di Kabupaten Sleman. Berbagai kata yang muncul dalam analisis, seperti “pupuk”, “petani”, “pengecer”, dan “Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)”, menunjukkan bahwa inti persoalan dalam tata niaga pupuk bersubsidi bukanlah soal ketersediaan stok, melainkan lebih pada mekanisme teknis yang berkaitan dengan tata cara penebusan di kios resmi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kelangkaan pupuk yang sering kali menjadi isu di tingkat nasional, pada kenyataannya tidak sepenuhnya relevan untuk konteks Kabupaten Sleman.

Petani di Kabupaten Sleman memang tidak menghadapi masalah serius terkait dengan keberadaan atau pasokan pupuk bersubsidi. Gudang pelaku usaha distribusi secara umum tetap mampu menyediakan sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah pusat. Akan tetapi, proses penyalurannya hingga sampai di tangan petani memerlukan tahapan administrasi yang terkadang menimbulkan kendala. Kendala ini terutama terkait dengan keharusan penebusan melalui sistem yang sudah diatur secara ketat, seperti penggunaan kartu tani, keterikatan pada RDKK, hingga aturan waktu dan tempat yang ditetapkan.

Kata-kata kunci yang muncul dalam analisis menegaskan bahwa “pengecer” memiliki peran sangat penting dalam tata niaga pupuk bersubsidi. Sebagai ujung tombak penyaluran, kios pengecer adalah pihak terakhir yang berinteraksi langsung dengan petani dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Di sinilah banyak pengalaman responden terfokus. Beberapa petani menyampaikan bahwa meskipun pupuk tersedia, mereka tidak bisa langsung menebus sesuai kebutuhan mendesak, karena harus memenuhi persyaratan administratif tertentu. Kondisi inilah yang sering dipersepsikan oleh petani sebagai kendala dalam memperoleh pupuk, meskipun secara objektif stok tetap ada.

Temuan ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa penelitian mengenai tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman bukan hendak menyoroti isu kelangkaan, melainkan lebih pada ketepatan mekanisme dan efektivitas prosedur penyaluran. Dengan demikian, kata kunci yang muncul dari analisis bukan hanya menggambarkan persoalan administratif, tetapi juga merefleksikan pengalaman petani yang berhadapan dengan sistem distribusi modern yang diupayakan pemerintah.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menyoroti peran kelembagaan yang terlibat, mulai dari produsen, pelaku usaha distribusi (distributor), hingga penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer). Kelembagaan ini sangat berpengaruh dalam memastikan pupuk dapat benar-benar sampai ke tangan petani dengan prosedur yang tepat. Kata-kata seperti “distributor”, “penyaluran”, dan “pengecer” yang muncul dalam hasil analisis menunjukkan adanya pola hubungan yang saling terkait. Distributor berperan sebagai kepanjangan tangan dari produsen dan kios pengecer menjadi ujung tombak pelayanan bagi penerima subsidi.

Kendala penebusan yang dirasakan oleh petani umumnya bersumber dari ketidakselarasan antara kebutuhan di lapangan dengan prosedur administrasi yang berlaku. Sebagai contoh, ada petani yang mendapati jadwal tanamnya maju lebih cepat akibat hujan datang lebih awal, sehingga kebutuhan pupuk juga harus dipenuhi lebih cepat. Ketika mereka datang ke kios, pupuk memang tersedia, tetapi tidak dapat ditebus sebelum waktunya sesuai aturan. Kondisi seperti ini bukanlah kelangkaan, melainkan kendala administratif yang membuat pupuk tidak langsung bisa diakses sesuai kebutuhan riil.

Dengan demikian, kata-kata kunci yang ditampilkan pada Gambar 4.2 bukan sekadar kumpulan istilah yang sering diucapkan responden, tetapi juga representasi dari pengalaman nyata petani dalam berinteraksi dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi. Analisis ini menegaskan bahwa penelitian ini tidak berangkat dari isu kelangkaan, melainkan dari upaya memahami efektivitas tata niaga yang sudah berjalan. Penekanan utamanya terletak pada bagaimana mekanisme penyaluran dan penebusan bisa disempurnakan, agar pupuk yang tersedia di kios dapat benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan petani.

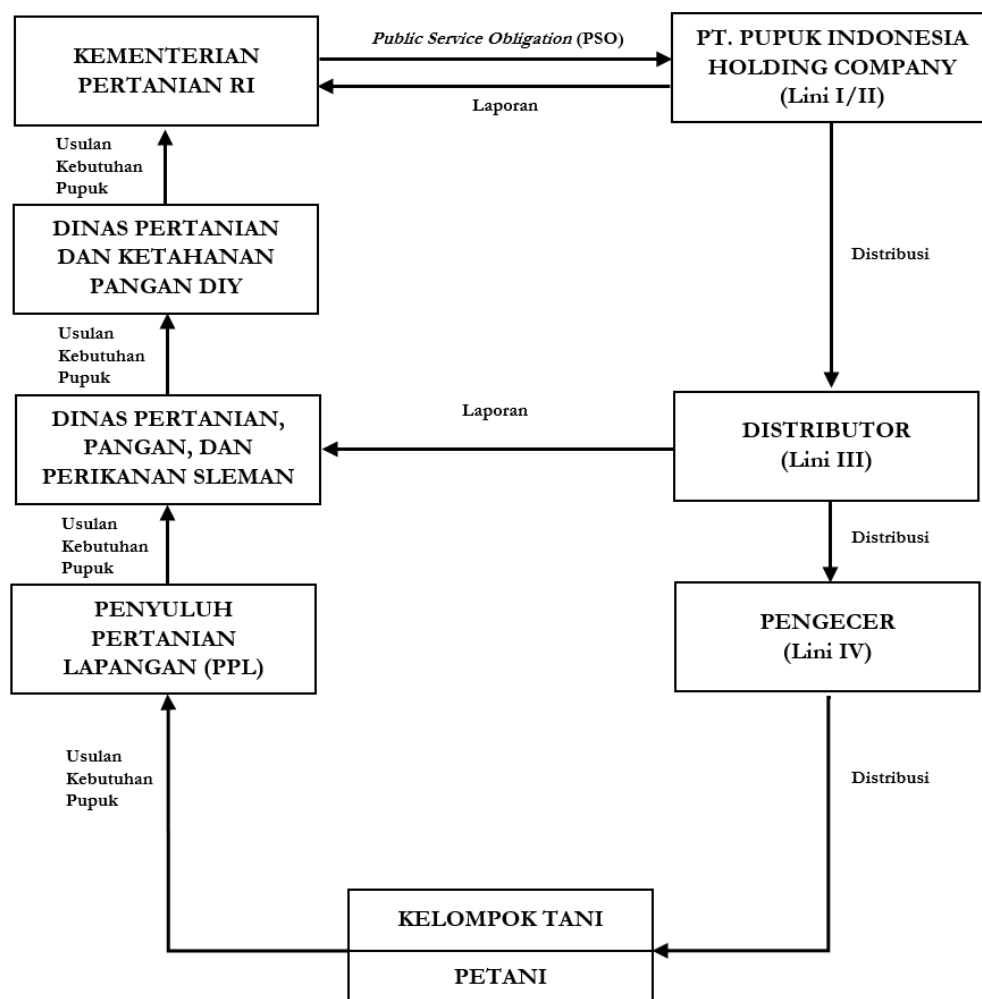
#### **4.1.3 *Text Search Query***

*Text search query* adalah istilah yang digunakan untuk menghubungkan beberapa titik data dan menautkan ke kalimat dalam data. Pencarian teks ini bisa dibaca dari kiri ke kanan, dan kata-kata yang ditulis dengan warna merah merupakan kata kunci utama dalam proses pencarian informasi. Ketika memasukan sebuah kalimat atau kata dalam permintaan pencarian, maka akan terlihat banyak kalimat yang saling berhubungan.

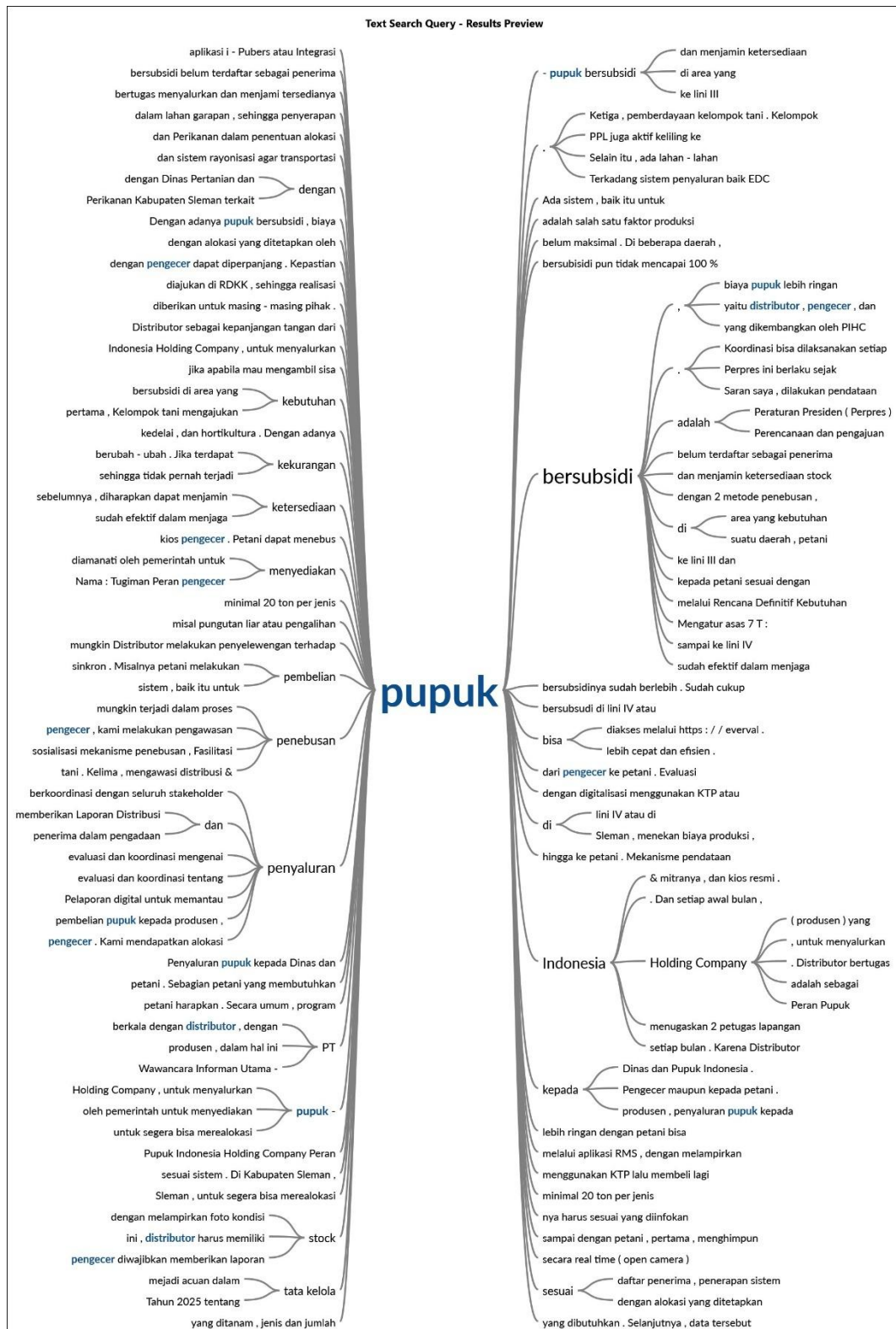
## 4.2 Stakeholder dalam Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman

### 4.2.1 Peran Stakeholder dalam Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman

Tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman melibatkan sejumlah *stakeholder* mulai dari tingkat pemerintah daerah, produsen, pelaku usaha distribusi (distributor), hingga penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer). Masing-masing *stakeholder* memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang saling terkait, sehingga keberhasilan tata niaga sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara mereka. Berikut ini ilustrasi alur tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman:



**Gambar 4. 3** Alur Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman



Gambar 4. 4 Gambaran Hasil Wawancara Mengenai Peran Stakeholder dalam Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman berperan sebagai pengendali dan pengawas utama dalam distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman. Pelaksanaan tugas ini diemban oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan yang memiliki kewenangan strategis mulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga evaluasi penyaluran. Tahap awal dimulai dengan penyusunan usulan alokasi pupuk bersubsidi yang dilakukan setiap tahun. Proses ini mengacu pada data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani melalui musyawarah anggota dengan bimbingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). RDKK memuat rincian jenis pupuk, jumlah kebutuhan berdasarkan luas lahan dan dosis ideal, serta identitas petani penerima, sehingga menjadi dokumen dasar bagi pemerintah dalam menetapkan alokasi pupuk bersubsidi maupun bagi petani untuk melakukan penebusan pupuk (Jamil, 2022). Dalam skema modern, penginputan RDKK kini menggunakan sistem elektronik (e-RDKK), yang diterapkan untuk memperketat alokasi subsidi dan mencegah penyelewengan. Sistem ini mewajibkan petani yang tergabung dalam kelompok tani, memiliki KTP, dan masuk dalam SIMLUHTAN untuk menginput data ke dalam e-RDKK. RDKK elektronik ini menjadi acuan utama dalam penyaluran Kartu Tani, yang berfungsi sebagai alat penebusan pupuk subsidi berdasarkan kuota yang telah disetujui. RDKK juga menjadi alat pengendali utama untuk memastikan pupuk disalurkan kepada yang berhak. Kartu Tani digunakan sebagai basis data yang mencakup identitas petani (NIK, alamat), luas lahan, komoditas, dan alokasi pupuk, semua informasi ini berasal dari RDKK elektronik (Hery Medianto Kurniawan et al., 2021).

Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman mengumpulkan seluruh RDKK dari kalurahan dan mengintegrasikannya ke dalam sistem elektronik e-RDKK, kemudian mengusulkannya kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk penetapan alokasi. Selain itu, dinas juga berperan dalam pengawasan distribusi di lapangan. Pengawasan ini dilakukan melalui kunjungan rutin ke pelaku usaha distribusi (distributor) dan penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer) untuk memastikan stok sesuai ketentuan, harga sesuai HET, dan penyaluran tepat sasaran kepada petani yang terdaftar. Dalam menjalankan fungsi ini, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari unsur pemerintah, kepolisian,

dan TNI. Tahap akhir dari peran pemerintah kabupaten adalah pelaporan penyaluran kepada pemerintah pusat. Laporan ini meliputi data realisasi penyaluran, jumlah stok di lapangan, dan kendala yang dihadapi. Laporan yang akurat sangat penting untuk perencanaan alokasi pupuk tahun berikutnya.

Produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi di Indonesia dikoordinasikan oleh PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* (PIHC) yang membawahi sejumlah anak Perusahaan, seperti PT Pupuk Sriwidjaja, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Kaltim. Tugas utama produsen adalah memproduksi dan menyalurkan pupuk sesuai alokasi yang telah ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pertanian. Produsen juga bertanggung jawab memastikan kualitas dan mutu pupuk sesuai standar. Hal ini penting karena pupuk yang tidak memenuhi standar mutu dapat mengurangi produktivitas tanaman dan merugikan petani. Selain itu, produsen wajib menjaga ketersediaan stok sesuai jadwal distribusi yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi keterlambatan yang bisa mengganggu musim tanam.

Pelaksana Usaha Distribusi (Distributor) adalah perusahaan atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen untuk menjadi perantara dalam penyaluran pupuk dari gudang produsen ke kios pengecer. Penunjukan pelaksana usaha distribusi dilakukan secara formal dan mereka harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki gudang penyimpanan, armada transportasi, dan tenaga kerja yang memadai. Peran distributor sangat krusial dalam memastikan kelancaran distribusi. Mereka menerima pupuk dari produsen dalam jumlah besar, kemudian menyalurkannya ke kios pengecer sesuai dengan alokasi yang ditentukan pemerintah. Dalam praktiknya, distributor juga melakukan koordinasi intensif dengan pengecer untuk menyesuaikan jadwal pengiriman dengan musim tanam dan kebutuhan aktual di lapangan. Selain fungsi distribusi fisik, distributor juga memiliki tanggung jawab administratif, seperti membuat laporan penyaluran kepada produsen dan pemerintah daerah, serta memastikan dokumen pendukung (surat jalan, faktur) sesuai dengan ketentuan.

Penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer) adalah ujung tombak distribusi pupuk bersubsidi yang berhadapan langsung dengan petani. Pengecer ini hanya bisa beroperasi jika memiliki izin resmi dan terdaftar dalam sistem distribusi nasional. Tugas utama kios pengecer adalah menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang namanya tercatat di e-RDKK dan telah mendapatkan alokasi.

Penjualan dilakukan sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Pengecer juga diwajibkan untuk memeriksa identitas petani dan memastikan bahwa penyaluran dilakukan kepada pihak yang berhak. Selain itu, pengecer memiliki kewajiban untuk mencatat setiap transaksi secara rinci, baik secara manual maupun melalui sistem digital jika tersedia. Pencatatan ini berguna untuk pelaporan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, pengecer juga memberikan informasi atau sosialisasi kepada petani terkait jadwal distribusi dan persyaratan penebusan pupuk bersubsidi.

Keberhasilan tata niaga pupuk bersubsidi di Sleman sangat ditentukan oleh sinergi antar-*stakeholder*. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman menjadi penghubung utama antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan. Produsen dan distributor harus memastikan ketersediaan stok sesuai jadwal, sementara pengecer bertugas melaksanakan penyaluran sesuai ketentuan dan melaporkan kendala yang ada. Koordinasi ini biasanya dilakukan melalui rapat rutin, komunikasi via telepon atau media digital, serta pelaporan tertulis.

**Tabel 4. 1** Poin Utama Hasil Penelitian Peran *Stakeholder* dalam Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman

No	Hasil Penelitian
1.	Dinas Pertanian, Pangan, dan Pertanian Kabupaten Sleman mengendalikan dan mengawasi distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK yang diverifikasi PPL dan diajukan lewat e-RDKK.
2.	Produsen pupuk memproduksi dan menyalurkan pupuk sesuai alokasi nasional dengan menjaga mutu dan ketersediaan stok.
3.	Pelaksana Usaha Distribusi (Distributor) menyalurkan pupuk dari gudang produsen ke Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) sesuai alokasi dan jadwal.
4.	Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) menjual pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar di e-RDKK sesuai HET dan ketentuan.
5.	Koordinasi antar- <i>stakeholder</i> memastikan kelancaran distribusi melalui rapat, komunikasi digital, dan pelaporan.

### **Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman**

*“Dinas Pertanian sangat berperan dalam pendampingan petani. Mulai dari perencanaan, usulan dari petani, kemudian nanti setelah mendapatkan kuota dari pusat, lalu menyampaikan ke petani, dan kemudian mendampingi petani di dalam bagaimana mereka mendapatkan pupuk subsidi, seperti membutuhkan sarana untuk penebusan, apapun kebijakan terkait pupuk subsidi kami sampaikan ke petani, karena itu kebijakan dari pusat. Kami menjadi perantaranya.”* (hasil wawancara dengan Ibu Siti Ruchayah Dwi Mulyani, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 7 Agustus 2025)

### **PT Pupuk Indonesia *Holding Company***

*“Kami berperan sebagai produsen yang diamanati oleh pemerintah untuk menyediakan pupuk-pupuk subsidi dan menjamin ketersediaan stock dari lini I sampai dengan lini IV atau pengecer. Distributor dan pengecer merupakan kepanjangan tangan dari produsen, dalam hal ini PT Pupuk Indonesia Holding Company, untuk menyalurkan pupuk-pupuk subsidi ke lini III dan lini IV. Dalam pelaksanaannya, distributor dan pengecer dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli atau SPJB dan surat penunjukkan, yang akan dievaluasi dan dapat diperpanjang setiap tahun. PIHC akan meng evaluasi kinerja distributor dan kios pengecer per triwulan. Penilaian dari evaluasi ini akan menentukan apakah kerja sama dengan distributor atau dengan pengecer dapat diperpanjang.”* (hasil wawancara dengan Ibu Erna Sulistiana, PT. Pupuk Indonesia Wilayah Jateng 3 dan DIY, 5 Agustus 2025)

### **Penyuluh Pertanian Lapangan**

*“Kami bersama teman-teman PPL melakukan pertemuan rutin dengan kelompok tani, kemudian mendata semua anggota kelompok yang membutuhkan alokasi pupuk subsidi, terdiri dari petani pemilik, petani penggarap, dan petani penyewa lahan, dengan membawa fotokopi KTP atau KK. Data petani harus sesuai dengan data kependudukan terbaru dari Dinas Dukcapil. Data yang diperlukan, nama, NIK, luas lahan, alamat atau posisi lahan, dan rencana jenis tanaman apa yang akan ditanam, apakah padi, jagung, atau hortikultura. PPL memasukkan data-data tersebut ke dalam aplikasi SIMLUHTAN. Selanjutnya, e-RDCK akan diverifikasi oleh PPL di masing-masing kapanewon, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi oleh Kepala UPT, Ketua Tim*

*Penyelenggaraan Penyuluhan, Kepala Bidang Penyuluhan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, kemudian Bupati. Setelah itu, menunggu penetapan kuota alokasi pupuk Kabupaten Sleman dari Kementerian Pertanian. Mulai saat ini, e-RDKK dapat diperbarui setiap 4 bulan sekali.”* (hasil wawancara dengan Ibu Saraswati, Penyuluh Pertanian Ahli Muda Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 7 Agustus 2025)

### **Pelaksana Usaha Distribusi (Distributor)**

*“Peran Distributor adalah sebagai kepanjangan tangan dari Pupuk Indonesia Holding Company. Distributor bertugas menyalurkan dan menjamin tersedianya pupuk bersubsidi di lini IV atau kios pengecer. CV. Arka Adhi Kana mendapatkan penugasan untuk melayani di 3 kapanewon, yaitu Mlati, Gamping, dan Depok, dengan 6 kios pengecer. Kami mendapatkan alokasi penyaluran pupuk sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pupuk Indonesia Holding Company selaku produsen yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah. Kami melakukan pengiriman kepada pengecer sesuai kebutuhan dan permintaan pengecer, setidaknya 3 kali dalam satu minggu.”* (hasil wawancara dengan Ibu Pranawengdyah Kartika Dewi, Pelaksana Usaha Distribusi (Distributor) CV. Arka Adhi Kana, 28 Juli 2025)

### **Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer)**

*“Peran pengecer menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan e-RDKK. UD Sumber Makmur sudah menjadi pengecer sejak tahun 2009 di Sumberadi, Mlati. Disini petani yang akan menebus pupuk menggunakan Kartu Tani, apabila Kartu Tani tidak bisa digunakan Petani bisa menebus menggunakan KTP yang akan diinput di sistem i-Pubers. Kami mencatat petani yang menebus pupuk dengan rekap kartu stock dan menempel struk nota setiap penyaluran.”* (hasil wawancara Ibu Tugiman, Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) UD. Sumber Makmur, 29 Juli 2025)

## **4.3 Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani dan Kendala dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman**

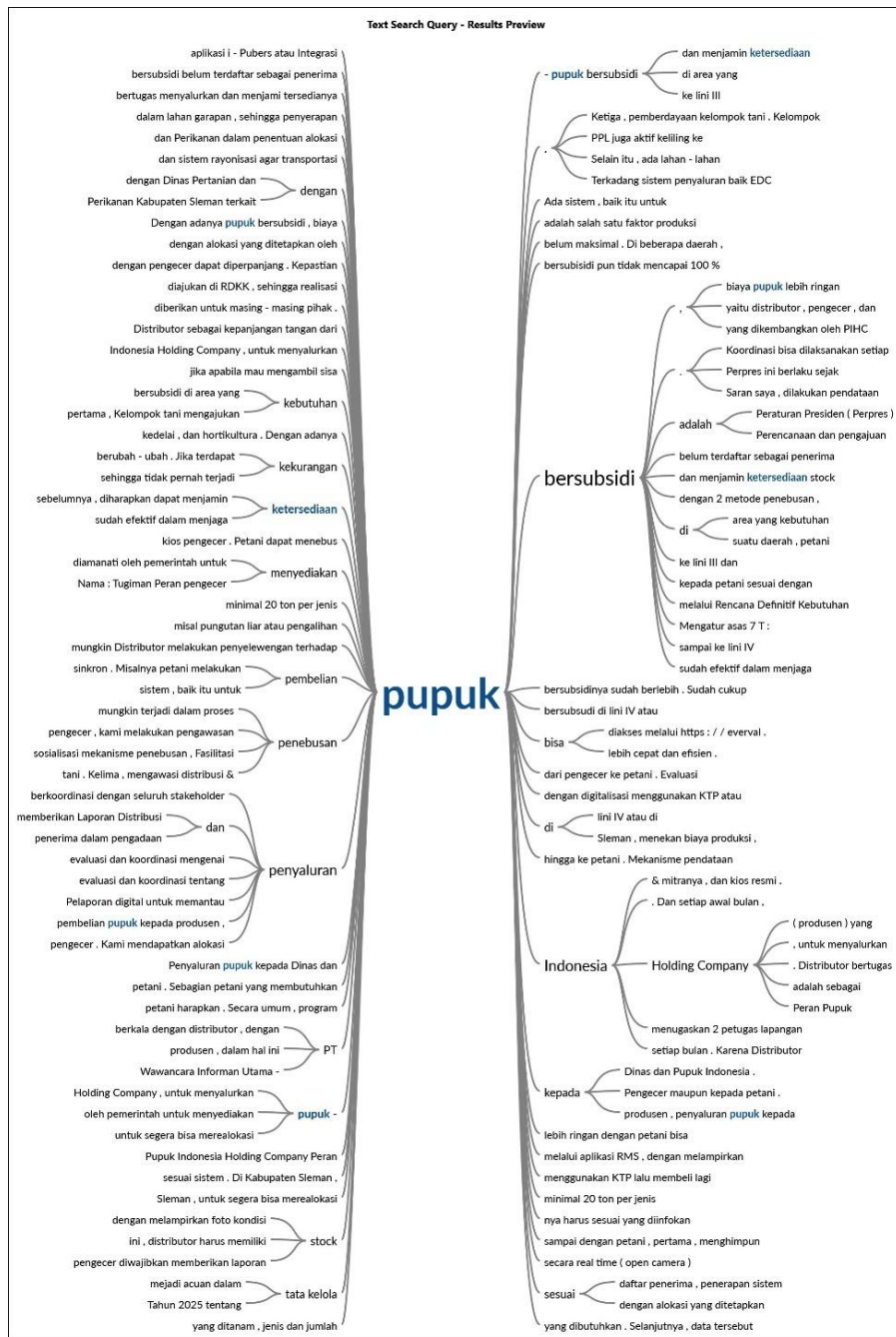
### **4.3.1 Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Sleman**

Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman didasarkan pada alokasi tahunan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, menjadi pijakan utama dalam menentukan volume pupuk yang disalurkan ke setiap daerah,

termasuk Kabupaten Sleman. Setelah alokasi nasional ditetapkan lewat Peraturan Menteri Pertanian, aturan ini diturunkan secara berjenjang melalui Keputusan Gubernur di tingkat provinsi dan Keputusan Bupati di tingkat kabupaten, memberikan landasan hukum yang kuat serta menjamin ketersediaan pupuk di tingkat pengecer agar petani penerima manfaat dapat memperoleh haknya (Darwis & Supriyati, 2013). Alokasi pupuk subsidi dirinci berdasarkan provinsi, jenis pupuk, jumlah, subsektor, dan distribusi bulanan. Proses ini juga memperhatikan pengajuan RDKK di tingkat lokal serta anggaran subsidi pupuk yang tersedia.

Pelaksanaan distribusi secara teknis dikoordinasikan oleh PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* sebagai produsen utama. Menurut Darwis & Supriyati (2013), sistem distribusi mengikuti pola lini, yaitu dari produsen (Lini I/Lini II), distributor (Lini III), hingga ke kios pengecer (Lini IV), di mana setiap lini memiliki tugas khusus, mulai dari produksi, pengawasan distribusi, hingga pelaporan rutin. Kebijakan tersebut juga ditegaskan dalam sejumlah regulasi, seperti Permentan Nomor 15 Tahun 2025, yang menekankan prinsip subsidi yang efektif berdasar e-RDKK dan sistem kartu tani untuk menjamin subsidi tepat sasaran.

Dalam konteks Kabupaten Sleman, alur distribusi bermula dari Lini III (pelaksana usaha distribusi/distributor) yang menerima pasokan dari produsen, dan kemudian menyalurkan ke Lini IV (penerima pupuk bersubsidi pada titik serah/kios pengecer). Sebagai produsen, PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* tidak hanya bertugas menyediakan pasokan, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya distribusi. Tujuannya adalah memastikan bahwa pupuk bersubsidi tersedia di tingkat pengecer sepanjang waktu dan dapat ditebus oleh petani kapan saja sesuai kebutuhan dan ketentuan.



Gambar 4. 5 Gambaran Hasil Wawancara Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Sleman

Untuk menjaga kelancaran, ketersediaan, dan akuntabilitas distribusi pupuk bersubsidi, PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* menerapkan serangkaian aturan dan mekanisme pengawasan. Aturan-aturan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis, sehingga meminimalkan potensi kekurangan stok, keterlambatan distribusi, maupun penyimpangan penggunaan pupuk. Tiga aturan utama yang diterapkan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan Kios Pengecer melalui Aplikasi RMS

Kios pengecer pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman diwajibkan melakukan pelaporan stok secara rutin melalui Aplikasi Rekan Kios (RMS). Jadwal pelaporan telah ditetapkan, yakni setiap hari Senin, Kamis, dan pada akhir bulan. Dalam setiap pelaporan, kios harus mengunggah dua foto stok pupuk yang dimiliki pada saat itu. Foto tersebut wajib dilengkapi dengan informasi lokasi (alamat) dan tanggal yang diambil secara otomatis dari sistem aplikasi, sehingga data yang disampaikan terjamin keasliannya dan tidak dapat dimanipulasi.

Selain melampirkan foto, kios juga diharuskan menginput jumlah stok pupuk yang tersedia pada saat pengambilan gambar. Proses ini bukan hanya menjadi sarana dokumentasi, tetapi juga sebagai bentuk monitoring real-time bagi produsen dan dinas terkait untuk mengetahui ketersediaan pupuk di tingkat pengecer. Mekanisme ini membantu memastikan bahwa pasokan pupuk di setiap kios berada pada level yang memadai dan dapat memenuhi kebutuhan petani yang telah terdaftar dalam sistem e-RDKK. Transparansi ini juga mencegah terjadinya penimbunan atau kekosongan stok yang dapat merugikan petani.

2. Peran Petugas Lapangan

Pengawasan lapangan di Kabupaten Sleman juga dilakukan secara langsung oleh dua orang petugas yang berperan sebagai *Assistant Account Executive* (AAE). Tugas utama AAE adalah melakukan kunjungan rutin ke berbagai kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya. Setiap hari, mereka berkeliling untuk memeriksa kondisi di lapangan, termasuk memverifikasi kesesuaian stok fisik dengan data pelaporan yang telah dikirimkan melalui aplikasi RMS.

Selain itu, AAE memastikan bahwa penyimpanan pupuk dilakukan sesuai standar mutu untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara penerima pupuk bersubsidi pada titik serah

(kios pengecer), pelaksana usaha distribusi (distributor), dan pihak produsen jika terjadi kendala teknis atau administrasi. Kehadiran AAE di lapangan menjadi langkah pengawasan aktif yang efektif untuk mengidentifikasi potensi masalah distribusi, seperti keterlambatan pengiriman atau penyalahgunaan penyaluran, sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara cepat sebelum berdampak pada ketersediaan pupuk bagi petani.

### 3. Pemantauan Penyaluran Pupuk secara *Real Time* melalui Aplikasi Siverpal

Selain pengawasan manual, penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman juga dipantau menggunakan sistem digital. Proses penyaluran, baik melalui Kartu Tani maupun dengan identitas KTP melalui Aplikasi Ipubers, dapat dilihat secara langsung oleh pihak produsen dan dinas terkait melalui Aplikasi Siverpal.

Aplikasi ini menampilkan data transaksi secara *real time*, mulai dari jumlah pupuk yang ditebus, identitas penerima, hingga lokasi kios yang menyalurkan. Dengan adanya sistem ini, pihak terkait dapat memantau penyaluran tanpa harus selalu hadir di lapangan. Setiap kali pupuk ditebus oleh petani di kios, data akan otomatis terekam dan dapat diakses kapan saja. Sistem ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan, sekaligus meminimalkan risiko penyelewengan distribusi.

Pemantauan *real time* ini juga memudahkan koordinasi antara produsen, pelaksana usaha distribusi (distributor), penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer), dan pemerintah daerah. Apabila ditemukan anomali, seperti stok yang menipis terlalu cepat atau penyaluran yang tidak sesuai ketentuan, tindakan korektif dapat segera diambil. Hal ini memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak, tepat waktu, dan dalam jumlah sesuai kebutuhan.

**Tabel 4. 2** Poin Utama Hasil Penelitian Ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Sleman

No	Hasil Penelitian
1.	Penyaluran pupuk bersubsidi di Sleman mengikuti alokasi nasional Kementerian Pertanian yang diturunkan menjadi Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati sebagai dasar ketersediaan pupuk di pengecer.
2.	Pengecer wajib melaporkan stok secara rutin melalui Aplikasi RMS dengan foto dan data otomatis untuk memastikan transparansi dan memudahkan monitoring produsen serta dinas terkait.
3.	Pengawasan dilakukan oleh AAE dan sistem digital Siverpal untuk memantau penyaluran <i>real time</i> , mencegah penyimpangan, dan memastikan pupuk sampai tepat sasaran.

#### **Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman**

*“Selama ini ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer relatif aman karena penyaluran mengikuti alokasi resmi dari Kementerian Pertanian yang sudah ditetapkan. Kami juga memantau melalui laporan rutin dari kios dan pengawasan langsung di lapangan, sehingga kalau ada kendala distribusi bisa segera kami tindak lanjuti.”* (hasil wawancara dengan Ibu Siti Ruchayah Dwi Mulyani, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 7 Agustus 2025)

#### **PT Pupuk Indonesia *Holding Company***

*“Kepastian pupuk bersubsidi sampai ke lini IV atau pengecer tepat waktu dan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam e-RDKK tertuang dalam SPJB mengenai pelaksanaan penyaluran dengan prinsip 7 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tempat harga, tempat jenis, tepat mutu, dan tepat penerima sesuai e-RDKK. Selain itu, sesuai evaluasi per triwulan, produsen dapat menetapkan jumlah minimal stock di gudang pelaksana usaha distribusi, atau dulu Namanya distributor, maupun kios pengecer yang sekarang namanya PPTS, sesuai kondisi di lapangan. Untuk periode saat ini, PUD harus memiliki stock pupuk minimal 20 ton per jenis pupuk bersubsidi. Untuk tahun 2025 alokasi pupuk subsidi sangat melimpah, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan adanya kekurangan pupuk.”* (hasil wawancara dengan Ibu Erna Sulistiana, PT. Pupuk Indonesia Kabupaten Sleman, 7 Agustus 2025).

### **Pelaksana Usaha Distribusi (Distributor)**

*“Untuk memastikan ketersediaan pupuk di lini IV atau di kios pengecer, kami memiliki stok yang tersedia di gudang penyangga atau gudang PUD minimal sebanyak 20 ton pupuk urea dan 20 ton pupuk NPK, yang dapat didistribusikan sewaktu-waktu sesuai permintaan. Sehingga tidak terjadi kekurangan stock di tingkat PPTS.”* (hasil wawancara dengan Bapak Suhesta Sigit, Pelaksana Usaha Distribusi (Distributor) CV. Karya Nyata, 30 Juli 2025).

### **Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer)**

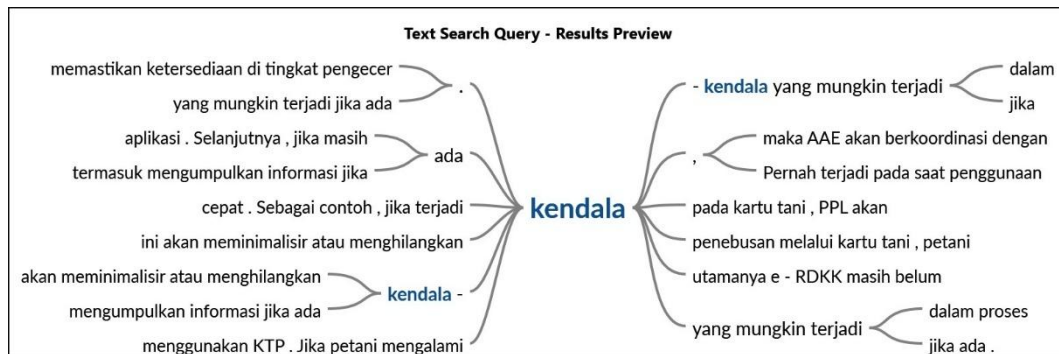
*“Stok pupuk bersubsidi di KUD Seyegan lebih dari cukup, dari produsen mewajibkan mempunyai stok sebanyak 2 ton urea dan 2 ton NPK, kami memiliki stok selalu lebih dari itu. Sehingga tidak pernah terjadi kekurangan pupuk.”* (hasil wawancara dengan Ibu Raminem, Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) KUD Seyegan, 29 Juli 2025).

### **Petani**

*“Selama saya jadi petani yang terdaftar dalam RDKK, saya selalu mendapatkan alokasi yang cukup. Pupuk subsidi selalu ada di kios pengecer, jumlahnya juga selalu banyak. Jadi tidak ada masalah kekurangan pupuk. Petani tinggal menebus saja ke kios pengecer sesuai alokasi.”* (hasil wawancara dengan Bapak Gito, Petani, 31 Juli 2025).

#### **4.3.2 Kendala dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman**

Meskipun secara umum ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman berada dalam kondisi aman dan mencukupi, dengan stok yang selalu tersedia di tingkat kios pengecer, pelaksanaan penyaluran di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Hambatan yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan atau kekurangan pasokan, melainkan oleh berbagai kendala teknis dan administratif yang menghalangi petani untuk dapat melakukan pennebusan sesuai prosedur yang berlaku.



**Gambar 4. 6** Hasil Wawancara Kendala Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman

Salah satu kendala yang cukup sering ditemui adalah penggunaan Kartu Tani. Sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, Kartu Tani menjadi instrumen utama yang terhubung dengan data e-RDCK untuk memvalidasi identitas dan kuota pupuk yang berhak diterima oleh petani. Kehilangan kartu ini berarti petani tidak dapat mengakses pupuk melalui sistem karena identitas mereka tidak dapat diverifikasi di mesin EDC atau aplikasi terkait. Proses pengurusan kartu pengganti seringkali memerlukan waktu dan administrasi tambahan, sehingga selama masa tunggu tersebut, petani tidak bisa menebus pupuk bersubsidi meskipun stok tersedia. Namun, saat ini petani bisa menebus pupuk menggunakan KTP.

Kendala lainnya adalah belum diperbaruinya data e-RDCK. Anisa dan Adnan (2021) dalam penelitiannya juga mengungkapkan kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah ketidaksesuaian antara data dalam e-RDCK dengan kondisi riil petani di lapangan. Pembaruan data e-RDCK menjadi sangat penting karena daftar ini merupakan acuan utama dalam penentuan penerima manfaat pupuk bersubsidi. Apabila petani belum memperbarui data mereka, misalnya akibat perubahan luas lahan, jenis tanaman, atau identitas kepemilikan, maka sistem akan menolak transaksi penebusan karena data penerima tidak sesuai atau tidak terdaftar. Hal ini membuat sebagian petani harus menunggu hingga periode pembaruan berikutnya sebelum dapat kembali mengakses hak pupuknya. Selain itu, terdapat lahan-lahan yang sudah dialihfungsikan peruntukannya namun masih terdaftar dalam lahan garapan, sehingga penyerapan pupuk belum maksimal. Hama tikus di beberapa daerah masih sangat tinggi sehingga menyebabkan gagal panen. Hal ini menyebabkan banyak petani yang

tidak menggarap sawahnya yang menyebabkan pula waktu tanam yang tidak serentak serta perubahan musim tanam akibat cuaca yang berubah-ubah.

Prosedur penebusan juga mengatur bahwa apabila petani berhalangan hadir dan ingin diwakilkan oleh orang lain, maka perwakilan tersebut harus membawa surat kuasa resmi yang ditandatangani oleh petani bersangkutan. Banyak petani yang tidak memiliki surat kuasa atau merasa enggan mengurus dokumen ini karena dianggap merepotkan dan memakan waktu. Akibatnya, ketika mereka tidak bisa hadir langsung, proses penebusan tidak dapat dilanjutkan. Permasalahan teknis semakin diperburuk oleh kondisi sebagian besar petani yang sudah berusia lanjut. Petani yang sudah lanjut usia seringkali kesulitan datang langsung ke kios untuk melakukan verifikasi foto sebagai bagian dari prosedur penebusan. Aturan verifikasi ini mengharuskan kehadiran fisik penerima manfaat untuk memastikan pupuk benar-benar disalurkan kepada pihak yang berhak. Keterbatasan fisik membuat sebagian petani memilih menunda atau bahkan melewatkan jatah pupuknya.

Seluruh hambatan ini bersifat non-pasokan, artinya bukan disebabkan oleh kelangkaan pupuk bersubsidi. Stok pupuk di pengecer tetap tersedia, bahkan dalam kondisi melimpah pada sebagian periode. Berbagai hambatan administratif dan teknis di atas berdampak nyata pada keterlambatan atau kegagalan penebusan oleh petani. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pupuk bersubsidi tidak hanya bergantung pada ketersediaan fisik pupuk di lapangan, tetapi juga pada kelancaran proses administrasi, kelengkapan dokumen, kedisiplinan dalam memperbarui data, serta kemudahan prosedur bagi petani, khususnya yang sudah lanjut usia.

Dengan demikian, penyelesaian permasalahan teknis ini memerlukan koordinasi dan inovasi dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, produsen pupuk, distributor, maupun pengecer, agar pupuk bersubsidi yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan oleh petani sesuai tujuan program, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

**Tabel 4. 3** Poin Utama Hasil Penelitian Kendala dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman

No	Hasil Penelitian
1.	Stok pupuk bersubsidi di pengecer Kabupaten Sleman selalu tersedia, namun petani sering terkendala masalah teknis saat penebusan.
2.	Permasalahan tersebut bersifat non-pasokan sehingga penyelesaiannya memerlukan perbaikan prosedur administrasi dan kemudahan akses bagi petani.

### **Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman**

*“Sampai hari ini, tata niaga pupuk bersubsidi sudah semakin baik. Tidak ada permasalahan yang terjadi pada penyaluran. Tidak ada kelangkaan pupuk. PPTS selalu ada stok sehingga dipastikan dan kami jamin tidak ada kelangkaan. Sebenarnya alokasi yang ada belum sesuai dengan usulan kabupaten, akan tetapi dikarenakan beberapa hal misalnya kondisi iklim atau ketersediaan air maka petani tidak melakukan tanam sesuai dengan rencana tanam yang telah diajukan di RDKK, sehingga realisasi pupuk bersubsidi pun tidak mencapai 100%.”* (hasil wawancara dengan Ibu Siti Ruchayah Dwi Mulyani, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 7 Agustus 2025)

### **PT Pupuk Indonesia *Holding Company***

*“Salah satu kendala yaitu masih rendahnya keaktifan petani yang melakukan penebusan, dari jumlah Petani 52.362 baru 49% yang melakukan penebusan sampai dengan 31 Juli 2025 atau baru 25.697 petani yang tebus, sisanya belum diketahui alasan kenapa belum melakukan penebusan, hal ini perlu dikroscek dan ditindaklanjuti ke lapangan agar serapan terus meningkat. Selain itu, faktor ketersediaan air juga sangat berpengaruh, karena aliran selokan mataram dan embung yang ada kadang ketersediaan air belum mencukupi untuk kebutuhan bercocok tanam di sekitaran lahan yang dilalui.”* (hasil wawancara dengan Ibu Erna Sulistiana, PT. Pupuk Indonesia Holding Company Wilayah Jateng 3 dan DIY, 7 Agustus 2025).

### **Penyuluh Pertanian Lapangan**

*“Dengan kelompok tani, kami melakukan pendataan kebutuhan untuk diinput ke dalam e-RDKK. Kami juga melakukan sosialisasi dan pendampingan. Terkait validasi dan pembaruan*

*data petani, meskipun waktu penyusunan e-RDKK ini sudah dimulai bulan Juni dan berakhir dibulan November, banyak PPL yang melakukan input diaplikasi mepet dengan waktu berakhirnya penyusunan sehingga yang terjadi adalah server aplikasi tersebut down. Akibatnya, sebagian petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi belum terdaftar sebagai penerima pupuk. Selain itu, ada lahan-lahan yang sudah dialihfungsikan peruntukannya namun masih terdaftar dalam lahan garapan, sehingga penyerapan pupuk belum maksimal. Di beberapa daerah, hama tikus masih sangat tinggi sehingga menyebabkan gagal panen. Hal ini menyebabkan banyak petani yang tidak menggarap sawahnya yang menyebabkan pula waktu tanam yang tidak serentak serta perubahan musim tanam akibat cuaca yang berubah-ubah.”* (hasil wawancara dengan Ibu Saraswati, Penyuluh Pertanian Ahli Muda Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman, 7 Agustus 2025)

#### **Pelaksana Usaha Distribusi (Distributor)**

*“Kami selalu berkoordinasi dengan PPTS melalui pertemuan rutin baik via online maupun offline. Kami memastikan stock selalu ada dan cukup di tingkat pengecer, yaitu minimal 2 ton untuk urea dan 2 ton untuk NPK. Kendala teknis yang terjadi di PPTS, kami coba untuk membantu menyelesaikan, kami juga berkoordinasi dengan PPL agar bisa segera teratasi.”* (hasil wawancara dengan Bapak Hari Duta, Pelaksana Usaha Distribusi (Distributor) CV. Sri Agung Rejeki, 31 Juli 2025).

#### **Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Pengecer)**

*“Saya sering melayani petani yang ingin menebus pupuk tapi terkendala, seperti data petani yang belum terupdate di e-RDKK. Selain itu, kartu tani juga ada kendala, saat petani memiliki piutang atau tunggakan pinjaman di BRI, maka saat mau transaksi pupuk di kios begitu uang di transfer dari deposit kios ke rekening petani, secara otomatis akan ter autodebet, sehingga transaksi pupuk tidak dapat dilanjutkan. Akhirnya, hal-hal seperti ini membuat penyaluran tidak maksimal.”* (hasil wawancara dengan Ibu Eli, Penerima Pupuk Bersubsidi pada Titik Serah (Kios Pengecer) UD. Madu Tani, 31 Juli 2025).

#### **Petani**

*“Saya sebagai petani kadang susah menebus karena persoalan administrasi yang ribet. Mungkin tujuannya bagus ya supaya benar-benar yang nebus itu petani yang terdaftar, tapi harusnya*

*kan administrasinya bisa dipermudah. Kendalanya itu, kartu tani saya hilang karena saya bawa ke sawah terus jatuh hilang, jadi saya harus nebus pakai KTP. Misalnya saya lagi sakit enggak bisa datang ke kios pengecer terus saya suruh anak saya yang nebus ke kios dengan membawa KTP saya, itu enggak bisa karena saya harus difoto di kios pengecer. Kan saya enggak bisa datang, kalau bisa datang ya saya kan enggak perlu minta anak saya yang nebus. Kalau anak saya yang nebuskan pupuknya, dia harus bawa surat kuasa, ini kan ribet ya. Kalau pakai kartu tani, misalnya yang nebuskan anak saya, itu bisa, kalau pakai KTP, itu harus difoto juga yang punya KTP di kios pengecer. Harusnya kan dibuat mudah saja supaya enggak menyulitkan petani.” (hasil wawancara dengan Bapak Gito, Petani, 31 Juli 2025).*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *stakeholder* dalam tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman berjalan melalui mekanisme yang terstruktur dan saling terkait. Dinas Pertanian, Pangan, dan Pertanian Kabupaten Sleman berfungsi sebagai pengendali utama dengan melakukan verifikasi RDKK melalui PPL dan memastikan usulan masuk ke dalam sistem e-RDKK. PT Pupuk Indonesia  *Holding Company* bertanggung jawab menjaga ketersediaan stok dan kualitas pupuk sesuai alokasi nasional, sementara pelaksana usaha distribusi (distributor) menyalurkan pupuk dari gudang produsen ke penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer) berdasarkan alokasi dan jadwal yang telah ditentukan. Penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer) menjadi ujung tombak dalam melayani petani dengan menjual pupuk bersubsidi sesuai HET kepada petani yang terdaftar di e-RDKK. Keseluruhan proses distribusi didukung oleh koordinasi antar-*stakeholder* melalui rapat, komunikasi digital, dan sistem pelaporan, sehingga distribusi pupuk bersubsidi dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan sesuai sasaran dalam mendukung kebutuhan petani di Kabupaten Sleman.
2. Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman terjamin melalui sistem alokasi dan pengawasan yang transparan. Kendala utama dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman bukan terletak pada kelangkaan pasokan, melainkan pada persoalan teknis dan administratif. Stok pupuk sebenarnya tersedia di kios, namun petani tidak bisa mengaksesnya karena terbentur aturan dan sistem distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar ada pada aspek tata kelola, bukan produksi. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur, pembaruan data e-RDKK, dan dukungan khusus bagi petani lansia atau yang mengalami kendala administratif menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi.

## 5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas tata niaga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman, diperlukan penguatan koordinasi antar-*stakeholder* melalui pemanfaatan sistem digital yang lebih terintegrasi antara Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman beserta seluruh petugas PPL di Kabupaten Sleman, PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*, pelaksana usaha distribusi (distributor), serta penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer). Selain itu, monitoring dan evaluasi rutin perlu ditingkatkan agar distribusi pupuk tidak hanya tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga, tetapi juga tepat sasaran, sehingga dapat semakin transparan dan akuntabel.
2. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman bersama  *stakeholder* terkait perlu melakukan perbaikan administratif, khususnya dalam pemutakhiran data e-RDKK dan optimalisasi penggunaan Kartu Tani. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendampingan oleh PPL. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur penebusan di penerima pupuk bersubsidi pada titik serah (kios pengecer) agar petani yang sudah berhak dan telah terdaftar dalam e-RDKK dapat dengan mudah melakukan penebusan. Dengan demikian, hambatan non-pasokan dapat diminimalisasi, dan ketersediaan pupuk bersubsidi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, F. W., Hartono, D., & Awirya, A. A. (2013). *Determinant Produktivitas Laban Pertanian Sub-sektor Tanaman Pangan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 110-125. <https://doi.org/10.23917/jep.v14i1.165>
- Anisa, F. & Adnan, M. (2021). Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4), 1137-1150. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2496>
- Bahriyah, A. (2023). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Energi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 55-70.
- Dunn, William N. (1999). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall, INC.
- Famela, O., Prayudhi, L. A., Zamrodah, Y., & Widiyatmanta, J. (2023). Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Wonotirto. *RADIKULA: Jurnal Ilmu Pertanian*, 2(1), 25-30. <https://doi.org/10.33379/radikula.v2i01.1898>
- Febriana, F. F., Maharani, A. D., & Mawardi, N. K. (2023). Efektivitas Kartu Tani dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen. *Jurnal Ilmiah Agritas*, 7(1), 47-53.
- Hidayat, F., & Hanri, M. (2023). Analisis Regional Dampak Program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Keluarga Penerima Manfaat. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 8(4), 371-386. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i4.677>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems* (5th ed.). Oxford University Press.
- Jamil A. (2023). Inklusivitas Kebijakan dan Peran Aktor dalam Pengelolaan Pupuk Bersubsidi untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 20(2), 161-72. <https://doi.org/10.21082/akp.v20i2.161-172>
- Jannah, D., Lestiana, H. T., & Junaedi, D. (2020). Peningkatan Produktivitas Pertanian Padi Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 234-249. <https://doi.org/10.70095/dimasejati.v2i2.7306.g3439>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 343. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Khaq, M. & Biswan, Ali. (2025). Optimalisasi Subsidi Pupuk: Mengatasi Inefisiensi Biaya Subsidi dan Mekanisme Distribusinya. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 5(1). 103-115. <https://doi.org/10.54957/jolas.v5i1.1322>
- Lumban Gaol, B. A., Anggreni, I.G.A.L., & Arisena, G.M. (2023). Analisis Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara (Studi Kasus pada CV Mas Ayu Lestari). *Journal of Agribusiness and Agritourism*, 12(1). <https://doi.org/10.24843/JAA.2023.v12.i01.p05>
- Moleong, Lexy J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulia, M. (2016). *Implementasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Panti Kabupaten Jember*. Skripsi, Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/77631>
- Ningrum, R. K., Pujiharto, P., & Dumasari, D. (2022). Efisiensi Distribusi Pupuk Bersubsidi di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Artha Tani Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 4, 338–347. <https://doi.org/10.30595/pspfs.v4i.523>
- Nuryanti, D. M., Zainuddin, A., & Lilis, L. (2025). Strategi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Agrikultura*, 36(1), 39-50. <https://doi.org/10.24198/agrikultura.v36i1.58438>
- Ramlayana, Ansyari, M. A., Sudarmi. (2020). Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Petani Padi di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. *KIMAP Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 950-962. <https://doi.org/10.26618/kimap.v1i3.3764>
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saputri, B., Putri, B. D., & Wibowo, B. (2023). Pengaruh Produktivitas Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Bangka Belitung. *KAMIKAWA: Jurnal Perencanaan Pembangunan dan Inovasi*, 3(1), 39-44. <https://journal.babelprov.go.id/index.php/kamikawa/index>
- Setiawan, Irianti, A. T., Rahayu, S., Ayen, R. Y., Suyanto, A., Astar, I., & Sutikarini. (2024). Sosialisasi Dan Mekanisme Mendapatkan Pupuk Bersubsidi Di Kelompok Tani Mekar Baru Desa Cipta Karya Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang. *Jurnal Bhakti Masyarakat FPST*, 2(1), 6–11.

- Sinaga, D. J. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani di Kabupaten Karanganyar. *Agrista: Jurnal Ilmiah*, 10(2), 59–72.
- Stiglitz, J. E. (2019). *Economics of the Public Sector* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanti, N., Waluyowati, L. R., & Sudrajat, S. (2023). Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Tingkat Petani Padi Sawah di Desa Sumberagung, Jetis, Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiah Agritas*, 4(1), 11–18.
- Tyas, Rohmah, Lestari. (2024). Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Tingkat Petani Kecamatan Buay Pemuka Peliung Ditinjau Dari Segi Ketepatan Tempat, Jumlah, Harga, Jenis, Waktu Dan Mutu. *SIMBIOSIS: Jurnal Sains Pertanian*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.30599/simbiosis.v1i1.3326>
- Wijaya. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffrai.
- Wijayanti, N., Ayu, I. W., Rahayu, S., & Usman, U. (2022). Evaluasi Sistem Distribusi Pupuk dalam Mendukung Ketersediaan dan Stabilitas Harga di Tingkat Petani. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 4(2), 315–325. <https://doi.org/10.58406/jrktl.v4i2.456>
- Wijayanti, N., Nurwahidah, S., Hartono, Y., Mastar, S. & Pebriana, L. (2024). Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Prinsip 6 Tepat di Kabupaten Sumbawa. *Musamus Journal of Agribusiness*, 7(1), 9-16. <https://doi.org/10.35724/mujagri.v7i1.5957>
- Wijayanto, H. & Lestari, O. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani (Studi Kasus Pada Petani Nanas di Desa Siwarak Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalinga Jawa Tengah). *Journal of Political Issues*, 3(2), 98-106. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.68>
- Williamson, O.E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*. New York: The Free Press.
- Zuriah. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Hasil Penelitian

#### Hasil Olah Data dengan Nvivo 12 Plus

##### 1. Peran *Stakeholder dalam Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman*

[<Files\\Wawancara Dinas Pertanian>](#) - § 2 references coded [0,19% Coverage]

Reference 1 - 0,10% Coverage

Peran Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman terkait dengan pupuk bersubsidi adalah melakukan perencanaan dan pengajuan kebutuhan melalui sistem e-RDKK, pendampingan teknis melalui PPL dan sosialisasi mekanisme penebusan, fasilitasi penebusan pupuk dengan digitalisasi menggunakan KTP atau Kartu Tani, dan koordinasi distribusi serta pengawasan agar subsidi tepat sasaran dan efisien.

[<Files\\Wawancara Distributor 1>](#) - § 1 reference coded [0,17% Coverage]

Peran Distributor sebagai kepanjangan tangan dari Pupuk Indonesia Holding Company. Distributor bertugas menyalurkan dan menjamin tersedianya pupuk bersubsidi di lini IV atau kios pengecer.

[<Files\\Wawancara Pengecer 1 - Mlati>](#) - § 1 reference coded [0,44% Coverage]

Reference 1 - 0,44% Coverage

Peran pengecer menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan e-RDKK.

[<Files\\Wawancara Pupuk Indonesia>](#) - § 1 reference coded [0,10% Coverage]

Reference 1 - 0,10% Coverage

Peran Pupuk Indonesia Holding Company adalah sebagai produsen yang diamanati oleh pemerintah untuk menyediakan pupuk-pupuk bersubsidi dan menjamin ketersediaan stock dari lini I sampai dengan lini IV atau pengecer.

## 2. Ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman

[<Files\\Wawancara Distributor 1>](#) - § 1 reference coded [0,45% Coverage]

Reference 1 - 0,45% Coverage

distributor punya stok di gudang minimal 20 ton Urea dan 20 ton NPK. Stok di Pengecer jika sudah 3 ton akan langsung di kirim oleh Distributor. Jadi tidak ada keterlambatan untuk kebutuhan petani.

[<Files\\Wawancara Pengecer 4 - Seyegan>](#) - § 1 reference coded [0,71% Coverage]

Reference 1 - 0,71% Coverage

selalu cukup karena gudang luas sehingga selalu mengisi gudang dan ketersediaan stock selalu berlimpah.

[<Files\\Wawancara Pengecer 5 - Prambanan>](#) - § 1 reference coded [0,59% Coverage]

Reference 1 - 0,59% Coverage

keterediaan stock selalu cukup sehingga dipastikan tidak terjadi kekurangan pupuk bersubsidi bagi petani.

[<Files\\Wawancara Dinas Pertanian>](#) - § 2 references coded [0,46% Coverage]

Reference 1 - 0,23% Coverage

tata niaga pupuk bersubsidi sudah efektif dalam menjaga ketersediaan pupuk di Sleman.

### **3. Kendala Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sleman**

[<Files\\Wawancara Pengecer 2 - Mlati>](#) - § 1 reference coded [0,33% Coverage]

Reference 1 - 0,33% Coverage

setiap mengirimkan saldo ke kartu tani petani sering hilang dikarenakan petani memiliki tunggakan pembayaran cicilan di bank.

[<Files\\Wawancara Pengecer 3 - Seyegan>](#) - § 1 reference coded [0,41% Coverage]

Reference 1 - 0,41% Coverage

kendalanya kalau terjadi error sistem saat proses penebusan oleh petani.

[<Files\\Wawancara Pengecer 4 - Seyegan>](#) - § 1 reference coded [0,41% Coverage]

Reference 1 - 0,41% Coverage

beberapa Petani yang terdaftar di e-RDKK tidak melakukan penebusan sehingga penyerapan tidak maksimal.

[<Files\\Wawancara Pengecer 5 - Prambanan>](#) - § 1 reference coded [0,35% Coverage]

Reference 1 - 0,35% Coverage

saya sering melayani petani yang ingin menebus pupuk tapi terkendala, seperti petani yang terdaftar tapi sudah sepuh kemudian yang mewakili orang lain tapi kami tidak bisa melayani karena harus punya surat kuasa.

[<Files\\Wawancara Pengecer 6 - Prambanan>](#) - § 2 references coded [0,83% Coverage]

Reference 1 - 0,41% Coverage

kalau kendala biasanya sistemnya sering error.

[<Files\\Wawancara Pupuk Indonesia>](#) - § 7 references coded [0,96% Coverage]

Reference 1 - 0,14% Coverage

mengumpulkan informasi jika ada kendala-kendala yang mungkin terjadi jika ada.

Reference 2 - 0,14% Coverage

Selanjutnya, jika masih ada kendala, maka AAE akan berkoordinasi dengan stakeholder penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu distributor, pengecer, dan PPL.

## **Lampiran 2 Pedoman Wawancara**

### **Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman**

1. Bagaimana tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, khususnya yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi?
2. Apa saja regulasi atau kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menjadi acuan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman?
3. Apakah ada kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mendukung distribusi pupuk bersubsidi?
4. Bagaimana peran Dinas Pertanian dalam penentuan alokasi pupuk sampai dengan petani?
5. Menurut Dinas, apakah jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan sudah sesuai dengan kebutuhan riil petani di Kabupaten Sleman?
6. Bagaimana pola koordinasi Dinas Pertanian dengan distributor, pengecer, dan kelompok tani?
7. Apakah ada mekanisme pengawasan distribusi pupuk bersubsidi untuk mencegah penyelewengan?
8. Apakah ada sistem pelaporan berbasis digital untuk memantau penyaluran pupuk?
9. Menurut Ibu, sejauh mana pupuk bersubsidi berpengaruh terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Sleman?
10. Apakah program subsidi pupuk sudah efektif dalam menjaga ketersediaan pupuk dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sleman?
11. Langkah apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk mengatasi permasalahan distribusi pupuk bersubsidi?
12. Apa rekomendasi Dinas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata niaga pupuk bersubsidi di Sleman, khususnya agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu?

### **Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)**

1. Apa saja peran PPL dalam pengajuan pupuk subsidi melalui e-RDKK?
2. Bagaimana mekanisme pendataan petani penerima pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman?
3. Apakah seluruh petani sudah terdaftar dalam e-RDKK?
4. Apakah ada kendala terkait validasi dan pembaruan data petani?
5. Seberapa intensif PPL terlibat dalam proses penebusan pupuk di lapangan?
6. Bagaimana proses penyusunan e-RDKK bersama kelompok tani?
7. Apa tantangan saat pengumpulan data dan input ke sistem?
8. Menurut Ibu, apakah sistem subsidi pupuk sekarang berjalan efektif?
9. Bagaimana Ibu menilai keakuratan data e-RDKK saat ini?
10. Apa usulan Ibu untuk meningkatkan sistem subsidi pupuk agar lebih berpihak kepada petani?

### **Produsen**

1. Apa peran PT Pupuk Indonesia Holding Company dalam tata niaga pupuk bersubsidi?
2. Bagaimana hubungan kerja antara PT Pupuk Indonesia Holding Company dengan distributor dan pengecer dalam proses distribusi pupuk bersubsidi?
3. Bagaimana sistem monitoring dan evaluasi distribusi yang dijalankan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company?
4. Apa kendala utama yang dihadapi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sleman?
5. Bagaimana PT Pupuk Indonesia Holding Company mengatasi masalah perbedaan antara kebutuhan riil petani dengan kuota yang ditetapkan pemerintah?
6. Menurut Bapak, apakah kebijakan pupuk bersubsidi sudah efektif dalam membantu petani di Sleman?
7. Bagaimana PT Pupuk Indonesia Holding Company memastikan pupuk bersubsidi tersedia bagi petani di kios pengecer?

8. Bagaimana PT Pupuk Indonesia Holding Company mengatasi kendala yang terjadi pada saat penebusan oleh petani di kios pengecer?
9. Apakah PT Pupuk Indonesia Holding Company sudah menggunakan sistem digital untuk memantau distribusi pupuk bersubsidi?
10. Bagaimana pandangan Bapak terkait penggunaan aplikasi e-RDKK dan kartu tani dalam mendukung penyaluran pupuk bersubsidi?
11. Menurut Bapak, kebijakan atau langkah apa yang perlu ditingkatkan pemerintah agar sistem distribusi pupuk bersubsidi lebih efektif?

### **Distributor**

1. Apa nama perusahaan Bapak/Ibu serta berapa jumlah kapanewon dan pengecer yang menjadi wilayah kerja Bapak/Ibu?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi distributor pupuk bersubsidi di wilayah Sleman?
3. Berapa jumlah kapanewon dan berapa jumlah pengecer yang menjadi cakupan distribusi Bapak/Ibu?
4. Bagaimana mekanisme Bapak/Ibu memperoleh alokasi pupuk dari produsen?
5. Seberapa sering Bapak/Ibu melakukan distribusi pupuk ke pengecer?
6. Apakah distribusi dilakukan sesuai kalender tanam atau berdasarkan permintaan mendesak?
7. Apakah Bapak/Ibu menerima masukan atau keluhan dari pengecer atau petani secara langsung?
8. Apakah sering terjadi *mismatch* antara data e-RDKK dan realisasi distribusi?
9. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang Bapak/Ibu lakukan dengan pengecer, Dinas Pertanian, dan Pupuk Indonesia?
10. Apakah ada sistem pelaporan digital terkait distribusi pupuk? Bagaimana sistem penggunaannya?
11. Bagaimana Bapak/Ibu menjamin tidak terjadi penyelewengan pupuk di tingkat distributor?
12. Apa saran Ibu untuk meningkatkan sistem tata niaga pupuk bersubsidi agar lebih responsif terhadap kebutuhan petani?

## **Pengecer**

1. Bagaimana mekanisme pennebusan pupuk oleh petani di kios Bapak/Ibu?
2. Bagaimana Bapak/Ibu mencocokkan data petani dengan e-RDKK?
3. Apakah jumlah pupuk yang tersedia biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan petani?
4. Apakah ada sistem pelaporan stok ke pemerintah? Apakah sistemnya mudah digunakan?
5. Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam penyaluran ke petani?
6. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang Bapak/Ibu lakukan dengan distributor dan PPL?
7. Bagaimana Bapak/Ibu menjaga agar tidak terjadi penyelewengan pupuk bersubsidi?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem distribusi saat ini sudah efektif dan efisien? Apa saran Bapak/Ibu untuk perbaikan sistem distribusi pupuk subsidi ke depan?

## **Petani**

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi penerima pupuk subsidi?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu menebus pupuk subsidi?
3. Siapa yang membantu Bapak/Ibu saat mendaftar ke e-RDKK?
4. Apakah pupuk selalu tersedia di kios pengecer?
5. Apakah terdapat kendala dalam proses pennebusan pupuk bersubsidi?

### Lampiran 3 Dokumentasi



Informan Kunci



Informan Utama 1



Informan Utama 2



Informan Utama 3



Informan Utama 4



Informan Utama 5



Informan Pendamping 1



Informan Pendamping 2



Informan Pendamping 3



Informan Pendamping 4



Informan Pendamping 5



Informan Pendamping 6



Informan Pendamping 7